

Reposisi Indonesia dalam Konstelasi Geoekonomi Baru



Cakrawala Strategis

No. 006/2026 - 24 Februari 2026

Tim Penulis:

Jessica Arreta

Raihan Andhika Dwi Wicaksono

Fathan Bariqi Dewangga

Ilustrator:

Muhammad Ilham

Rudi Yusuf



Ringkasan Eksekutif

Isu perang dagang kembali mencuat semenjak terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat (AS). Meskipun kebijakan tarif bukan merupakan instrumen baru dalam perdagangan internasional, fenomena kali ini membawa paradigma baru bahwa eskalasi besaran tarif diterapkan secara universal berdasarkan posisi neraca perdagangan tiap negara. Dinamika ini mencerminkan pergeseran fundamental dari sistem perdagangan yang semula berbasis mekanisme pasar menuju rezim yang dikendalikan oleh proteksionisme dan kalkulasi geopolitik. Di tengah

ketegangan tersebut, lanskap ekonomi global berubah menjadi peluang bagi negara ketiga untuk muncul sebagai penerima manfaat melalui mekanisme pengalihan perdagangan akibat proteksi terhadap produk Tiongkok.

Namun, peluang tersebut tidak langsung terjadi secara otomatis. Kajian sejauh ini menunjukkan bahwa eskalasi perang dagang belum menunjukkan pengalihan perdagangan yang berkelanjutan bagi Indonesia dalam arti pertumbuhan pangsa pasar yang bersifat jangka panjang. Setiap kenaikan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat bersifat sementara dan cepat kembali ke level awal. Sebaliknya, penyesuaian paling konsisten justru terjadi di sisi impor, di mana Indonesia mencatat peningkatan impor dari Tiongkok, terutama barang konsumsi antara, tanpa diiringi ekspansi ekspor barang jadi. Analisis sektoral secara deskriptif juga mengonfirmasi bahwa sektor yang paling terdampak tarif Amerika Serikat terhadap Tiongkok seperti sektor TIK, media, komputer, layanan bisnis dan keuangan tidak menunjukkan penguatan peran Indonesia sebagai pemasok alternatif. Untuk sektor lainnya, meskipun Indonesia dan Tiongkok juga memiliki derajat keserupaan yang cukup signifikan khususnya untuk sektor manufaktur padat karya dan teknologi menengah, perubahan struktur ekspor Indonesia terhadap Amerika Serikat pasca eskalasi tarif sejauh ini mengafirmasi bahwa dependensi Indonesia terhadap ekspor ke AS masih sangat rendah.

Pendalaman inferensial untuk menggambarkan respons struktural terhadap guncangan memperkuat simpulan tersebut. Menggunakan pendekatan *panel local projection* yang menguji dinamika efek lintas waktu, ditemukan bahwa respons ekspor Indonesia hanya memberikan stimulus positif minor pada fase awal, setidaknya sampai enam periode (bulan) ke depan. Pada periode setelahnya, Indonesia gagal menunjukkan substitusi substansial terhadap barang Tiongkok. Tren ini mengindikasikan bahwa lonjakan awal tersebut bukanlah representasi dari pengalihan perdagangan yang mapan. Lebih cocok dipahami sebagai refleksi antisipasi pasar jangka pendek pascapengenaan tarif terhadap Tiongkok.

Kondisi ini kontras dengan profil ekspor Tiongkok yang menunjukkan kemampuan melonjak balik (*rebound*) cepat dan pertumbuhan positif yang persisten secara tren. Disparitas ini menegaskan bahwa ekspor Indonesia ke pasar Amerika Serikat masih kurang memiliki daya tahan struktural. Hal ini mungkin saja terjadi dan tidak terlepas dari berbagai faktor seperti sifat barang yang terpengaruh distorsi, serta kekuatan pasar produsen Tiongkok yang berfokus kepada barang olahan yang secara teknologi lebih canggih dan memiliki elastisitas substitusi lebih rendah.

Dengan mengomparasi dinamika perang dagang pertama dan kedua, kajian sampai kepada kesimpulan bahwa efektivitas penyerapan peluang tersebut bergantung kepada tingkat kesiapan Indonesia dalam menginternalisasikan perubahan arsitektur global ke dalam struktur industri domestik. Saat ini, Indonesia berada di posisi kesiapan industri menengah yang menghadapi risiko terjebak dalam peran perakitan atau pasar antara di tengah rezim tarif yang semakin unilateral dan tidak pasti. Oleh karena itu, reposisi strategis Indonesia

tidak lagi cukup bertumpu kepada keunggulan biaya atau stabilitas makro, melainkan menuntut percepatan transformasi struktural untuk naik kelas dalam konstelasi geoekonomi baru.

Sebagai penutup, tulisan ini mengajak pembaca untuk melihat fenomena perang dagang sebagai refleksi atas faktor-faktor endogen yang dapat dikendalikan. Pertanyaan utamanya bukan lagi mengenai ada atau tidaknya pengalihan perdagangan, tetapi apakah Indonesia dengan segala kondisinya siap mengubah dinamika dunia yang semakin tidak menentu ini menjadi peluang strategis. Hal yang perlu dipahami adalah dengan ketiadaan perubahan arah kebijakan yang mendasar, episode disrupsi ini berisiko berhenti kepada kepuasan semu atas limpahan ekspor yang rapuh dan bersifat sementara.

Pendahuluan

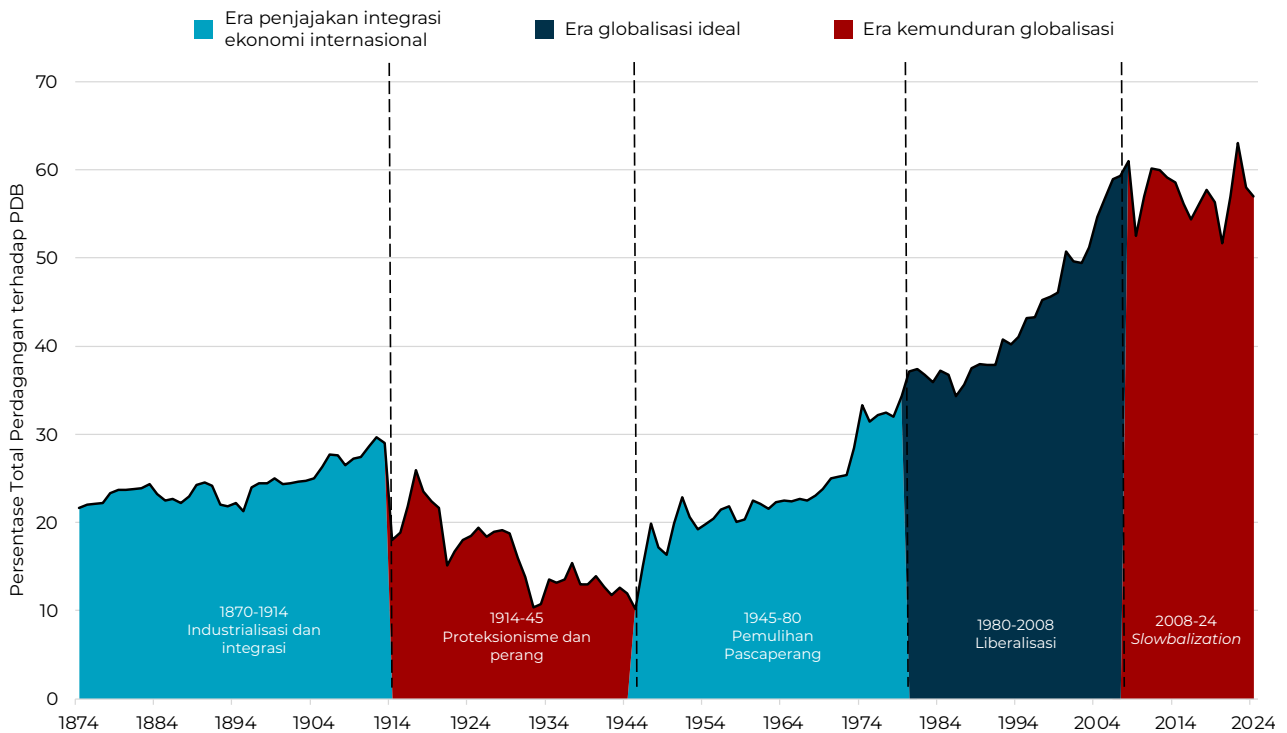
Setidaknya terdapat dua kerangka teori besar yang menjelaskan bagaimana perdagangan internasional bekerja. Pertama adalah teori klasik yang salah satunya dirumuskan oleh David Ricardo melalui konsep keunggulan atau biaya komparatif, di mana ditekankan bahwa negara akan mengekspor komoditas yang dapat diproduksi dengan biaya peluang (*opportunity cost*) paling rendah.¹ Keputusan melakukan ekspor atau impor didasarkan kepada kata kunci spesialisasi berbasis biaya atau keuntungan, di mana bersandar ke efisiensi penggunaan input untuk memproduksi barang. Dalam kerangka serupa, model Heckscher-Ohlin memperluas penjelasan ini dengan melihat perdagangan yang terbentuk sebagai akibat dari perbedaan spesialisasi berbasis faktor produksi; apakah suatu negara cenderung padat karya atau padat modal.²

Selain dua konsep itu, perdagangan menekankan peran skala ekonomi dan diferensiasi produk.³ Hal inilah yang menjadi landasan bagaimana hubungan perdagangan yang secara klasik diyakini terjadi secara bilateral mengalami perluasan makna melalui keterlibatan dalam *Global Value Chain* (GVC). Tidak selalu dalam artian produksi sampai proses akhir, tetapi berkontribusi di segmen tertentu dari rantai produksi juga tetap dipandang sebagai perdagangan yang terjalin dalam skala internasional.⁴

Namun, seiring waktu, dinamika perdagangan global kontemporer justru bergerak semakin jauh dari asumsi-asumsi ideal yang dibangun teori klasik. Evolusi sistem perdagangan modern menunjukkan adanya erosi makna terhadap apa yang disebut dengan keterbukaan. Meminjam istilah "*slowbalization*" yang dipopulerkan oleh Adjiedj Bakas untuk menggambarkan perlambatan laju globalisasi dan integrasi ekonomi sejak krisis keuangan global 2008.⁵ Kalkulasi proporsi perdagangan (mencakup ekspor dan impor) terhadap PDB sebagaimana dicermati dalam Bagan 1 memperlihatkan kondisi yang tampak relevan hingga sekarang, di mana dunia dihadapkan dengan fenomena *slowbalization* seiring melemahnya dukungan politik terhadap perdagangan bebas seiring meningkatnya tensi geopolitik, dunia multipolar, dan fragmentasi ekonomi berbasis aliansi.

International Monetary Fund (IMF) memperkenalkan istilah fragmentasi geoekonomi sebagai kebijakan antitesis dari integrasi ekonomi di mana negara ditempatkan berdasarkan blok-blok yang dilandasi oleh berbagai pilihan strategis, antara lain isu keamanan ekonomi dan faktor geopolitik.⁶ Menjadi tidak heran bahwa dunia saat ini cenderung mengalami pergeseran struktural tujuan perdagangan dari mencari efisiensi dan kemakmuran kolektif menuju orientasi bertahan (resiliensi) dan perlindungan kepentingan nasional (*national interest*). Dengan kata lain, arsitektur perdagangan global bergerak menuju kondisi yang semakin tidak ideal, di mana intervensi kebijakan, baik berupa tarif maupun hambatan non-tarif, semakin mendistorsi mekanisme pasar.

Bagan 1. Perkembangan Keterbukaan Perdagangan Dunia, 1874-2024⁷

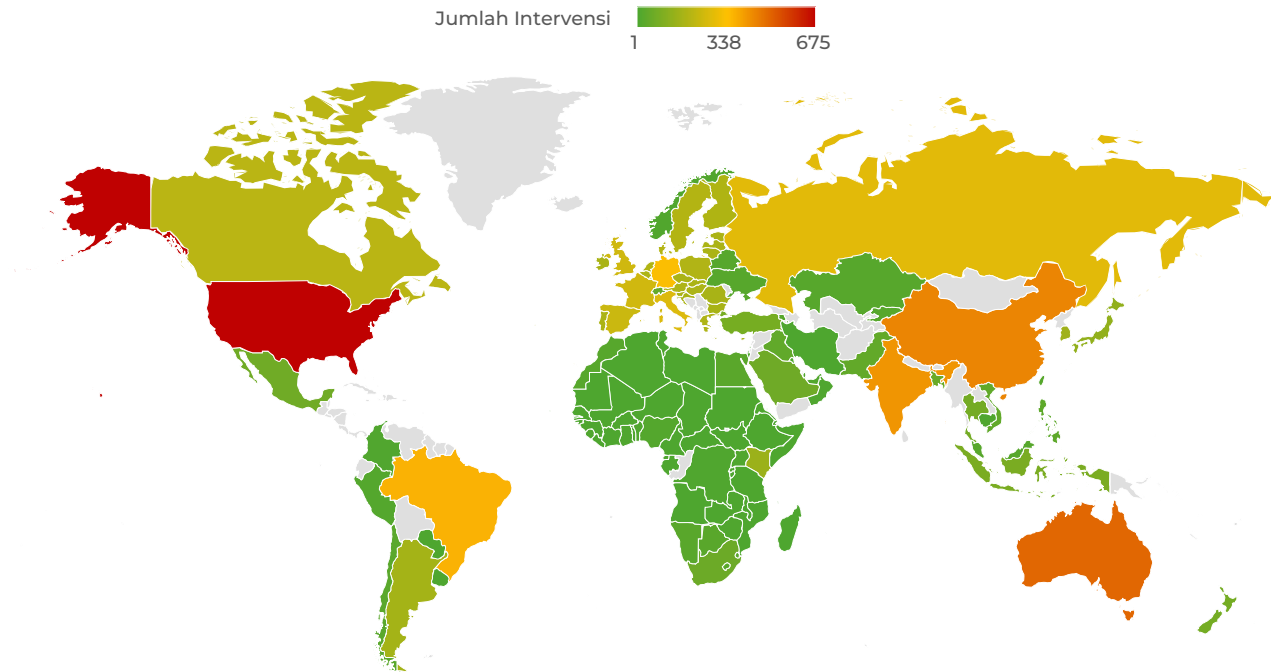


Sumber: Peterson Institute for International Economics (diolah)

Di tengah pembentukan aturan perdagangan baru yang terus meningkat setiap tahunnya, arah kebijakan dunia sejak tahun 2008 menunjukkan tren yang lebih diskriminatif dibandingkan upaya liberalisasi. Tren persisten ini berlanjut hingga tahun 2025, di mana pembentukan aturan perdagangan diskriminatif mencapai 3.684 aturan atau mencakup 73 persen dari total regulasi baru. Angka tersebut kontras dengan aturan yang bersifat liberal yang hanya berjumlah 1.349 aturan. Di antara berbagai negara, Amerika Serikat (AS) tercatat sebagai aktor dengan intensitas intervensi perdagangan tertinggi di dunia, yakni mencapai 633 intervensi (lihat Bagan 2). Dari puluhan jenis yang ada, peningkatan intervensi global didominasi oleh kebijakan tarif impor dengan proporsi mencapai 855 kebijakan atau menyumbang 17 persen dari keseluruhan kebijakan pada tahun 2025 ini.

Intervensi tersebut telah menandai kembalinya pendekatan proteksionisme dalam tatanan perdagangan global. Arah kebijakan semakin terakselerasi setelah penggunaan instrumen tarif oleh AS secara unilateral yang didasarkan kepada persepsi terhadap negara-negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS. Setidaknya, di bawah kepemimpinan Donald Trump baik pada periode pertama maupun kedua, AS secara konsisten menerapkan strategi industrialisasi berbasis substitusi impor melalui kebijakan proteksionis. Namun, penting untuk dipahami bahwa penerapan proteksi tarif ini memiliki tujuan yang berbeda dari pola industrialisasi tradisional di negara berkembang. Mengingat status AS sebagai negara industri maju dengan struktur manufaktur yang telah matang, maka kenaikan tarif, terutama dalam konteks perang dagang kedua ini bukanlah instrumen untuk memicu ekspansi industri baru.

Bagan 2. Jumlah Intervensi Perdagangan Dunia, 2025⁸



Sumber: Global Trade Alert (diolah)

Sebaliknya, kebijakan lebih didorong oleh motivasi bertahan hidup (*survival motive*) dibanding motivasi ekspansi (*expansion motive*).⁹ Dengan menetapkan investasi domestik sebagai syarat untuk mendapatkan pengecualian tarif (*tariff waiver*), AS berupaya mempertahankan basis manufaktur di tingkat keahlian menengah-bawah yang selama ini telah tergerus oleh persaingan global. Berangkat dari pemahaman itu, strategi AS saat ini lebih tepat dibaca sebagai langkah memitigasi de-industrialisasi dengan tetap berupaya menjaga kedaulatan ekonomi domestik.

Pengulangan kembali atas sejarah rezim perdagangan global menunjukkan bahwa WTO sebagai hasil evolusi panjang Putaran Uruguay dan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang berupaya menurunkan hambatan perdagangan serta memperdalam integrasi ekonomi. Tertuang dalam Doha Development Agenda pada Konferensi Menteri 2001 di Doha bahwa perdagangan dimaksudkan untuk menjadi penggerak pembangunan, utamanya bagi negara berkembang dan *Least Developed Countries*.¹⁰ Meski DDA tidak lagi aktif, spirit dasarnya tetap relevan sampai saat ini bahwa perdagangan tidak seharusnya dimaksudkan sebagai arena adu kekuatan proteksionis.

Dengan melemahnya institusi global yang memiliki mandat aturan mengikat, perang dagang berpotensi menimbulkan deviasi mendalam dari tujuan awal perdagangan untuk membangun kesejahteraan bersama. Perang ekonomi yang berkepanjangan tidak hanya mengganggu arus perdagangan dan investasi, tetapi juga meningkatkan ketidakpastian yang dapat menekan pertumbuhan ekonomi global. Disrupsi rantai pasok serta volatilitas harga input menjadi harga yang harus dibayar. Negara berkembang, yang selama ini menjadi bagian

penting dari rantai produksi ikut menghadapi turbulensi yang tidak kecil. Pada periode perang dagang pertama, terdeteksi adanya efek tarif kumulatif, di mana tarif AS terhadap Tiongkok turut menambah beban biaya bagi mitra dagang lain, meskipun negara-negara tersebut tidak menjadi target langsung kebijakan.¹¹ Fenomena ini terjadi karena struktur GVC yang saling terhubung menyebabkan biaya tarif untuk barang antara terakumulasi setiap kali produk tersebut melintasi batas negara. Akibatnya, kenaikan biaya input di satu titik produksi (seperti Tiongkok) secara otomatis menurunkan daya saing dan margin keuntungan perusahaan di negara mitra hilir yang bergantung kepada pasokan tersebut. Pola serupa berpotensi terulang pada periode kedua, bahkan dengan intensitas yang lebih tinggi, mengingat cakupan tarif yang kini semakin luas.

Meski sarat tantangan, rivalitas AS-Tiongkok bukan hanya episode sengketa tarif bilateral belaka. Ia merupakan manifestasi perubahan tatanan ekonomi dunia yang implikasinya merambat kepada jaringan rantai nilai global. Dalam konteks ini, negara ketiga berpotensi menjadi penerima manfaat melalui mekanisme pengalihan perdagangan. Fenomena ini merujuk kepada perpindahan arus impor suatu negara, dari semula pemasok yang paling efisien (dalam hal ini Tiongkok) beralih kepada negara mitra strategis lain yang lebih kompetitif secara tarif. Negara berkembang dalam hal ini dapat memanfaatkan peluang tersebut. Kenaikan harga relatif produk Tiongkok di pasar AS menciptakan celah bagi negara dengan struktur ekspor serupa untuk melakukan penetrasi pasar secara cepat. Selain itu, keuntungan struktural yang dimiliki negara berkembang seperti biaya tenaga kerja kompetitif serta iklim investasi relatif stabil membuat diversifikasi basis produksi sebagai hal yang tidak terelakkan.

Sejumlah negara seperti Vietnam dan Meksiko telah menunjukkan keberhasilannya dalam menarik relokasi industri, khususnya sektor elektronik, otomotif, dan tekstil; sektor yang kala itu dikenai tarif tinggi dari AS ke Tiongkok.¹² Bagi Indonesia, relevansi kajian ini menjadi semakin mendesak. Di tengah narasi global tentang *friend-shoring*, *China Plus One*, dan diversifikasi rantai pasok, Indonesia kerap disebut sebagai kandidat potensial penerima relokasi produksi. Namun, indikator struktural menunjukkan bahwa transformasi industri domestik berjalan lambat, yang berakar dari lemahnya kualitas institusi pendukung industrialisasi. Hambatan institusional yang tercermin dari tingginya biaya logistik, inefisiensi birokrasi, serta kebijakan yang kurang harmonis telah menghambat pergeseran faktor produksi dari sektor produktivitas rendah ke sektor produktivitas tinggi. Akibatnya, ketergantungan kepada komoditas dan industri padat karya masih sangat tinggi, sementara integrasi ke segmen bernilai tambah menengah-tinggi dalam GVC belum terwujud.

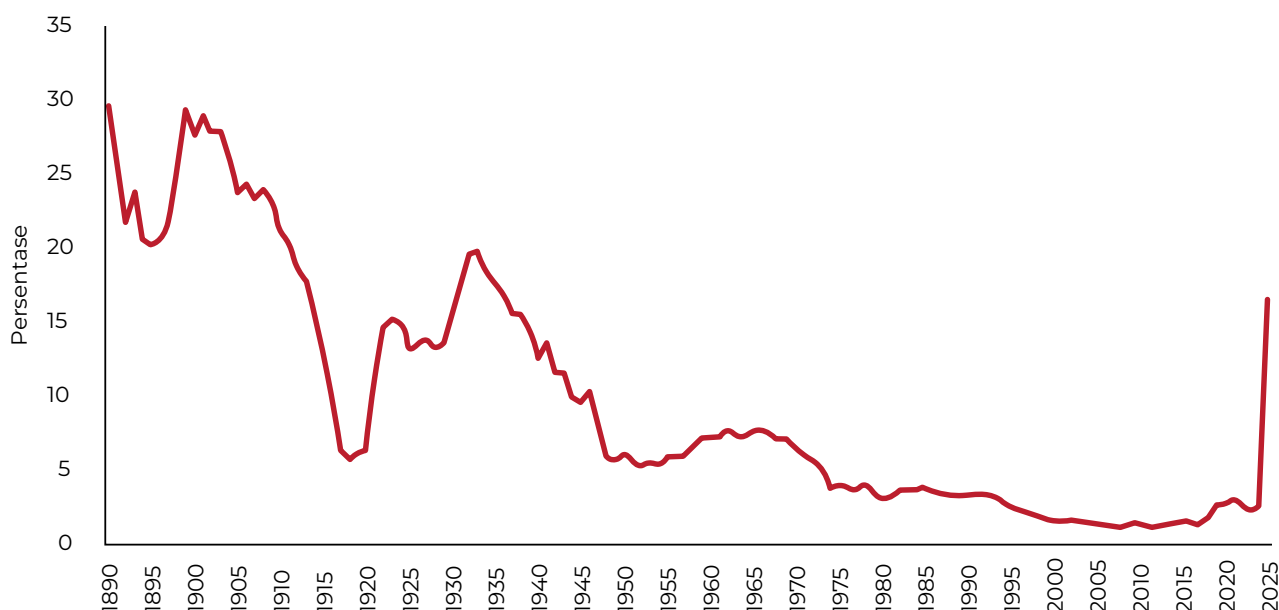
Berangkat dari dinamika tersebut, kajian ini menggunakan perang dagang AS-Tiongkok sebagai tolok ukur untuk melihat kesiapan struktural Indonesia dalam menyerap pengalihan perdagangan akibat konflik dagang global. Sebagai dua aktor utama yang membentuk arah dan intensitas perang dagang global, keputusan ekonomi AS dan Tiongkok menghasilkan efek rambatan yang luas terhadap perdagangan dan investasi internasional. Indonesia, di sisi lain, berada

di posisi unik sebagai negara berkembang besar dengan potensi pasar domestik dan sumber daya yang signifikan, tetapi belum sepenuhnya terkonsolidasi sebagai sentra atau penghubung produksi manufaktur global. Dengan menempatkan Indonesia di tengah rivalitas AS-Tiongkok, kajian ini berupaya menjawab dua pertanyaan kunci. Pertama, sejauh mana peluang pengalihan perdagangan dari rivalitas tersebut dapat dimanfaatkan Indonesia secara berkelanjutan, serta kedua adalah bagaimana kesiapan industri domestik membentuk kemungkinan pemanfaatan peluang tersebut.

Kilas Balik Perang Dagang Jilid 1 dan 2

Perang dagang AS-Tiongkok dapat dipahami sebagai aspek berulang dari histori proteksionisme AS. Sejak berdiri, Amerika Serikat mengandalkan rezim tarif untuk membangun industri dalam negeri dengan tingkat yang sangat tinggi, khususnya selama periode pasca-Perang Sipil.¹³ Amerika Serikat baru sepenuhnya merangkul liberalisasi perdagangan setelah Perang Dunia II, ketika keunggulan ekonominya menjadikan keterbukaan sebagai hal yang menguntungkan secara strategis.¹⁴ Saat itu, AS menobatkan dirinya sebagai pionir keterbukaan ekonomi, meski sejumlah intervensi selektif tetap berlanjut seperti subsidi pertanian, pembatasan ekspor sukarela (*voluntary export restraint*) terhadap barang-barang Jepang pada tahun 1980-an, dan proteksi sektoral untuk baja dan otomotif.¹⁵

Bagan 3. Tingkat Tarif Rata-Rata Amerika Serikat, 1890-2025¹⁶



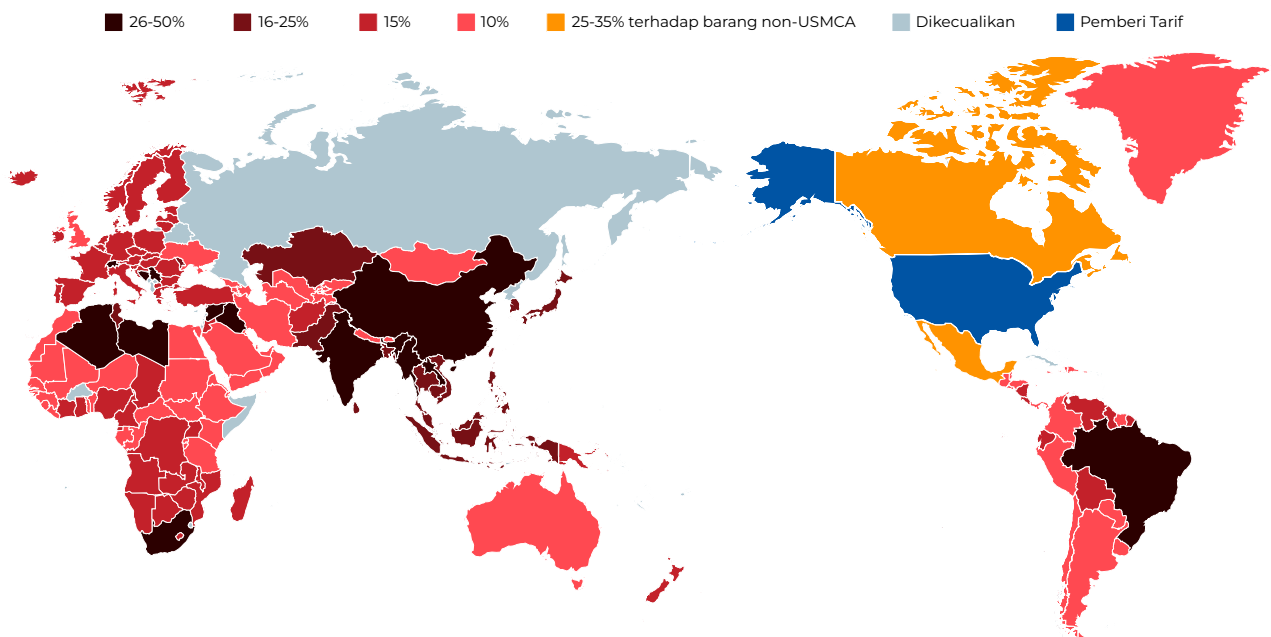
Sumber: IFG Progress (diolah)

Dengan tingkat tarif yang terus termoderasi semenjak satu abad sebagaimana terlihat di Bagan 3, kini AS kembali sebagai antitesis dari globalisasi yang diciptakan. Setidaknya AS telah menempuh langkah perang dagang sebanyak dua kali, yakni pada masa pemerintahan Donald Trump pertama (2018-2019) dan kedua (2025). Perbandingan keduanya menunjukkan rezim tarif resiprokal saat

ini telah jauh melampaui apa yang telah dilakukan AS sebelumnya. Pengenaan tarif pada pemerintahan Trump pertama memiliki tarif yang cukup besar namun terarah. AS memberlakukan tarif impor kepada barang antara yang diproses seperti baja dan aluminium (dengan variasi tarif antara 10-25 persen) kepada negara-negara tertentu, dengan Tiongkok sebagai target utama.¹⁷ Kebijakan dirancang terutama untuk menjaga keamanan nasional AS (Section 232) dan mengatasi praktik persaingan tidak adil (Section 301), seperti subsidi ekspor yang memicu penjualan komoditas manufaktur Tiongkok dengan harga yang rendah sekali (*dumping*), manipulasi Renmimbi, pelanggaran kekayaan intelektual, hingga praktik transfer teknologi paksa.¹⁸ Sementara, negara lain seperti Kanada dan Meksiko menyangkut isu migrasi dan penyebaran narkoba.

Secara taktis, pengetatan AS dianggap bukan sebagai penolakan terhadap globalisasi, melainkan sebagai upaya untuk melindungi “posisi vital” AS dalam menentukan arah tata kelola ekonomi global yang sejalan dengan kepentingan keamanan nasionalnya. Oleh karena itu, kebijakan tarif era Trump tidak sepenuhnya ditinggalkan pada pemerintahan Joe Biden. Tarif dipertahankan dalam kerangka yang lebih selektif dan terintegrasi dalam tujuan memperkokoh industri domestik yang terlihat melalui Inflation Reduction Act (IRA) dan Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors (CHIPS) and Science Act.

Bagan 4. Persebaran Tarif Resiprokal Amerika Serikat per 6 Agustus 2025¹⁹



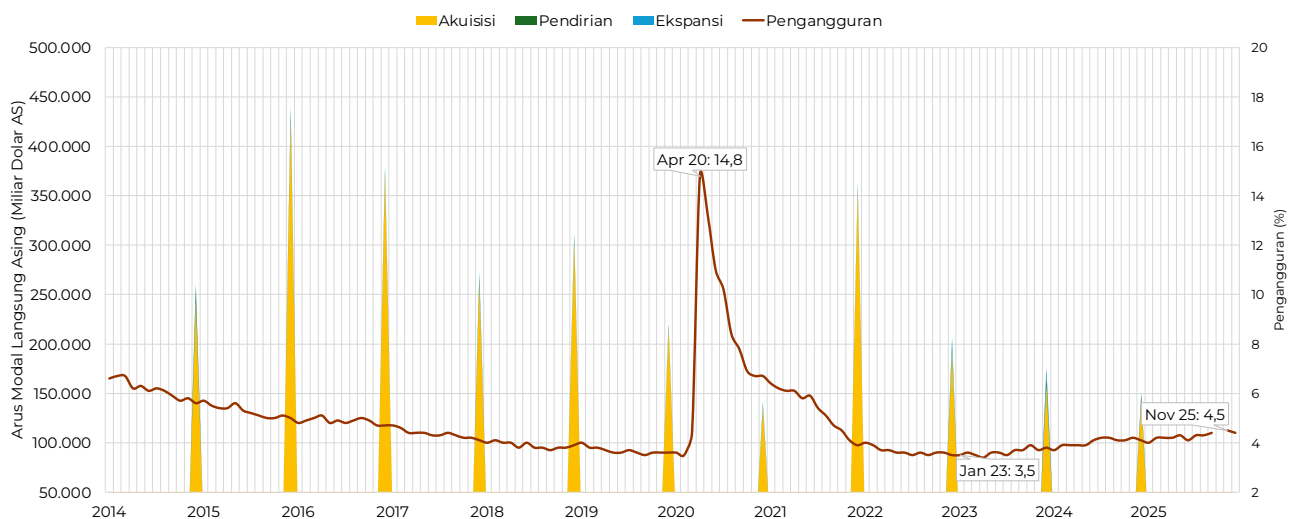
Sumber: Statista (diolah)

Semangat mengembalikan amanat “*Make America Great Again*” mendorong manuver Trump yang agresif dan unilateral pada periode keduanya. Tarif diumumkan sebagai “*global reciprocal tariff regime*” yang efektif berlaku pada 9 April 2025 lalu. Dikemas oleh Trump dalam Executive Order 14257 (Liberation Day) yang secara simbolik merepresentasikan “pembebasan” industri AS dari ketergantungan impor yang telah terjadi selama tiga dekade terakhir.²⁰ Tarif

diberlakukan sebagai deklarasi darurat nasional soal defisit perdagangan, yang dikemas melalui mekanisme International Emergency Economic Powers Act (IEEEA). Melalui kebijakan ini, Trump mengenakan tarif hampir kepada seluruh produk impor dari 57 negara, dengan tarif dasar 10 persen serta menambahkan tarif spesifik yang lebih tinggi bagi negara dengan ekspor ke Amerika Serikat melebihi 20 persen impor.²¹ Negara yang memiliki surplus perdagangan terhadap AS seperti Laos, dan Kamboja harus menghadapi tarif awal hingga 50 persen. Negara yang terintegrasi dalam rantai nilai global seperti Vietnam pun dikenakan tarif 46 persen. Fenomena ini memperlihatkan bahwa Trump memakai logika yang cukup sederhana, bahwa semakin besar ketergantungan AS terhadap perdagangan dari suatu negara maka negara tersebut akan dikenakan tarif yang semakin tinggi. Hal ini dapat dilihat di Bagan 4.

Dalam praktiknya, AS lebih banyak berfungsi sebagai pasar korporasi global, di mana arus FDI didominasi oleh aktivitas akuisisi perusahaan yang sudah ada. Di sisi lain, pembangunan entitas baru dan ekspansi industri yang menambah kapasitas produksi dan penyerapan tenaga kerja relatif terbatas. Tulisan ini menyadari bahwa terlalu prematur untuk mengesampingkan faktor *scarring effect* pasca-Pandemi Covid-19 dalam menjelaskan kelesuan ekonomi. Tetapi bila ditinjau lebih rinci semenjak pandemi berakhir pada tahun 2022, pertumbuhan FDI di AS terus menunjukkan pelemahan yang persisten. Penurunan nilai investasi ini berjalan selaras dengan indikator ketenagakerjaan yang mulai memburuk, di mana jumlah pengangguran di AS merangkak naik dari posisi terendah sebesar 1,1 juta orang pada Februari 2023 menjadi 1,9 juta orang pada Agustus 2025 (Lihat Bagan 5).

Bagan 5. Perbandingan Arus Modal Asing Langsung (FDI)²² dan Jumlah Pengangguran²³ di Amerika Serikat, 2014-2025



Sumber: U.S. Bureau of Economic Analysis (diolah)

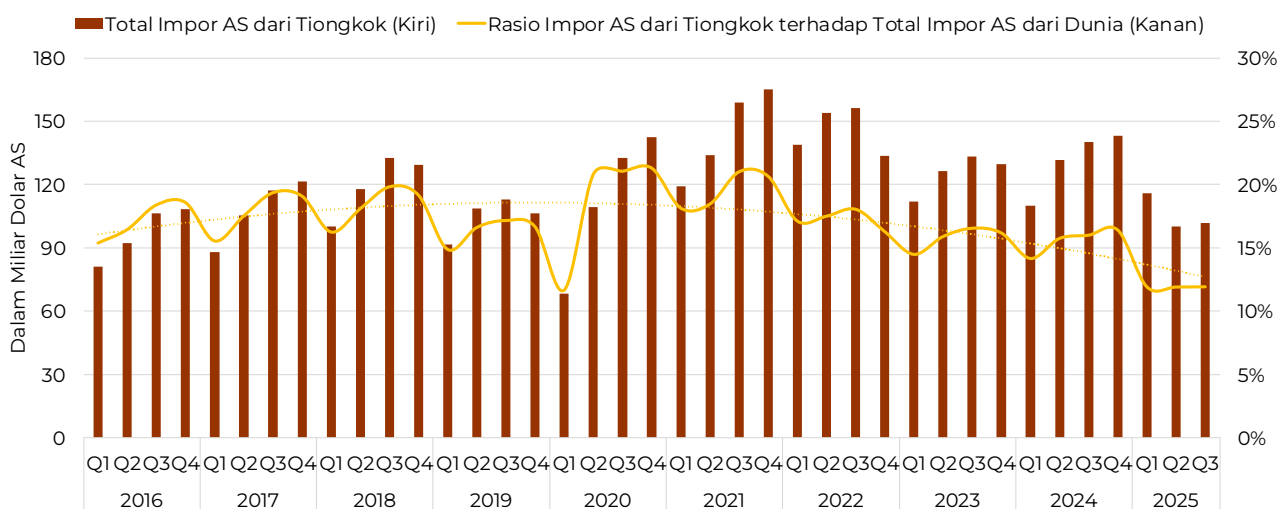
Meskipun dunia dihadapkan oleh tarik ulur kebijakan yang semakin tidak konsisten di mana tarif sewaktu-waktu bisa diberlakukan, direvisi, dinaikkan, ditangguhkan bahkan dicabut secara sepihak tanpa parameter yang konsisten,

pengumuman dimulainya orde ekonomi global baru saat ini memberikan studi kasus penting untuk merefleksikan dampak perubahan biaya perdagangan terhadap negara-negara lain. Pengalaman dari kejadian perang dagang periode sebelumnya diharapkan dapat menjadi manifestasi awal dalam melihat guncangan yang saat ini dan ke depannya tidak memiliki pola pasti.

Rivalitas Geoekonomi dan Implikasinya terhadap Dunia

Manuver Trump yang menandai penguatan konfigurasi neo-merkantilisme bergerak menuju arah kebijakan yang sulit diprediksi oleh siapapun, yang umum dikenal sebagai Trump tantrum.²⁴ Inti dari orientasi baru ini adalah keinginan untuk memutus ketergantungan struktural kepada satu pusat produksi global, dalam hal ini Tiongkok. Jejak dari upaya tersebut sebenarnya telah terlihat sejak beberapa tahun terakhir, di mana ekspor Tiongkok ke Amerika Serikat terus menunjukkan tren penurunan (Lihat Bagan 6). Tidak hanya gangguan produksi akibat pandemi Covid-19 dan persoalan kelebihan kapasitas manufaktur Tiongkok,²⁵ moderasi hubungan dagang keduanya makin kentara sejak fase pertama perang tarif (2018-2021), lalu kembali mengeras pada episode kedua (2025). Kondisi itu memperlihatkan proteksionisme agresif dari AS.

Bagan 6. Impor Amerika Serikat dari Tiongkok, 2016-2025²⁶



Sumber: Trade Map (diolah)

Rivalitas geoekonomi kontemporer bergerak dalam pola *tit-for-tat* yang kerap membawa negara-negara kepada eskalasi hingga tingkat yang tidak rasional, di mana motif geopolitik mengesampingkan kerugian ekonomi riil. Instrumen seperti tarif, retaliasi, dan berbagai *Non-Tariff Measures* (NTM) telah menciptakan beban langsung bagi pihak yang terlibat dalam konflik dagang. Namun distorsi yang sama juga membuka peluang, yakni terbentuknya pergeseran arus perdagangan global yang baru kepada jalur yang tidak tersentuh oleh beban tarif. Dalam konteks itu, kerangka teori klasik pengalihan perdagangan menjadi relevan. Kebijakan perdagangan yang menghambat seperti tarif dan kuota yang

diterapkan kepada suatu negara menciptakan ruang perdagangan baru yang dapat diisi oleh negara yang tidak terkena restriksi, meskipun bukan produsen dengan biaya paling efisien.²⁷ Dalam hal ini, keunggulan komparatif tidak lagi bekerja dalam ruang kompetisi yang netral, melainkan dalam lanskap yang sudah direformulasi oleh suatu intervensi kebijakan.

Sebagai ilustrasi empiris atas kerangka tersebut, bea masuk tinggi terhadap produk Tiongkok membuat importir AS mencari sumber pemasok baru yang secara biaya lebih murah dan secara politis lebih strategis atau *like-minded*. Pada saat yang sama, Tiongkok merespons dengan mengalihkan ekspornya ke pasar non-AS. Pergeseran ini memicu rekonfigurasi GVC, di mana perusahaan multinasional mendiversifikasi sebagian rantai pasok mereka ke kawasan seperti Amerika Latin dan Asia Tenggara sebagai strategi mitigasi risiko tarif. Meski manfaat ekonomi langsung dari proses ini masih relatif terbatas,²⁸ efeknya terhadap struktur produksi regional sudah terdeteksi sejak periode pertama perang tarif, di mana negara berkembang yang tidak menjadi target kebijakan mampu menangkap peluang pengalihan perdagangan dari pergeseran arus impor AS.

European Central Bank dalam penelitiannya menemukan bukti terbatas mengenai efek agregat pengalihan perdagangan ke negara ketiga (Lihat Lampiran 1 dan 2).²⁹ Misalnya Vietnam dan India, produk-produk yang terdampak tarif mengalami kenaikan ekspor ke AS lebih tinggi dibandingkan produk tidak terkena tarif semenjak kebijakan tarif diberlakukan. Lebih lanjut, negara-negara berkembang Amerika Latin seperti Brasil, Argentina, dan Meksiko mendapatkan manfaat diversifikasi dengan produksi besi, baja, serta aluminium meningkat hingga 1,5 sampai 4,2 persen.³⁰ Bahkan dalam skenario yang memperhitungkan retaliasi dari Tiongkok pada perang dagang pertama, ditemukan kontraksi tajam dari ekspor kedelai AS, yang merupakan komoditas andalan AS ke Tiongkok, mencapai 14 persen. Sebagai catatan, komoditas ini menjadi instrumen retaliasi utama bagi Tiongkok untuk menekan balik ekonomi AS, yang kemudian memicu pengalihan pemenuhan kebutuhan pangan Tiongkok dari pemasok AS ke negara-negara produsen di Amerika Selatan. Pada kerangka waktu tersebut, produksi kedelai di Brasil dan Argentina diketahui meningkat masing-masing sebesar 9,3 persen dan 4,47 persen.

Studi yang dilakukan oleh UNCTAD pada tahun 2019 menyampaikan temuan yang lebih luas bahwa perang dagang periode pertama memicu pengalihan perdagangan sekitar 21 miliar Dolar AS (Lihat Bagan 7), atau sekitar 63 persen dari penurunan ekspor Tiongkok ke AS terhadap produk-produk yang terkena tarif selama periode tersebut. Metodologi yang digunakan untuk menghitung angka tersebut adalah dengan mengidentifikasi selisih kenaikan impor AS dari negara mitra untuk tingkat produk yang sangat detail (kode *Harmonized System* 8-digit). Setiap kenaikan ekspor dari negara lain untuk kode produk yang sama dengan produk Tiongkok yang terkena tarif dicatat sebagai nilai pengalihan, setelah melalui proses penskalaan ulang (*rescaling*) untuk memastikan akurasi nilai substitusi murni.

Bagan 7. Efek Pengalihan Perdagangan dalam Pasar Amerika Serikat Berdasarkan Sektor, Semester I 2019 (dalam Juta Dolar AS)³¹

	MESIN KANTOR	BERBAGAI MESIN LAINNYA	MESIN LISTRIK	BAHAN KIMIA	PERLENGKAPAN ELEKTRONIK	LOGAM DAN BIJIH	INSTRUMEN PRESISI	PANGAN	PERLENGKAPAN TRANSPORTASI	FURNITUR	TEKSTIL DAN PAKAIAN	LAINNYA	TOTAL
Taiwan	2830	122	287	5	491	205	183	6	14	55	8	11	4217
Meksiko	420	407	876	127	0	373	166	599	456	99	47	0	3570
Uni Eropa	108	739	422	324	0	96	371	215	285	0	66	55	2681
Vietnam	60	8	400	134	1106	130	18	14	52	665	4	10	2601
Jepang	63	997	0	342	10	62	0	21	1	0	12	32	1540
Kanada	39	307	110	0	416	83	62	21	76	0	0	83	1197
Korea Selatan	568	99	68	95	13	52	2	19	117	5	48	29	1115
India	18	68	83	243	0	181	23	23	6	27	41	42	755
Thailand	0	124	25	243	0	58	0	0	4	22	4	1	481
Brasil	0	191	27	129	9	71	7	4	11	0	4	0	451
Federasi Rusia	0	0	19	143	0	54	0	56	1	0	0	74	347
Malaysia	12	0	12	40	0	50	76	0	1	58	2	1	251
Turki	0	23	12	17	31	89	9	13	5	11	14	1	226
Indonesia	0	29	27	0	42	25	4	0	1	0	2	0	129
Australia	0	5	0	23	13	0	4	16	2	26	3	3	95
Argentina	0	22	1	8	0	27	0	9	0	3	1	3	75
Afrika Selatan	0	3	3	30	0	0	4	13	0	5	2	0	60
Pakistan	0	0	0	5	0	0	1	3	0	2	25	0	37
Negara Lainnya	179	82	89	272	10	78	261	33	0	3	583	25	1616
Total Peralihan Perdagangan	4297	3226	2461	2142	2142	1635	1190	1065	1031	981	866	371	21443

Sumber: United Nations Conference on Trade and Development (diolah)

Taiwan, Meksiko, Uni Eropa, dan Vietnam tercatat sebagai penerima manfaat terbesar, terutama di sektor mesin kantor dan peralatan mesin lainnya. Sebaliknya, Indonesia menunjukkan respons yang relatif terbatas dengan total limpahan perdagangan hanya sebesar 129 juta Dolar AS atau setara 0,6 persen dari keseluruhan besaran pengalihan perdagangan global. Berdasarkan data matriks di atas, nilai yang kecil bagi Indonesia ini terkonsentrasi hanya untuk beberapa kategori, yaitu peralatan komunikasi (42 juta Dolar AS), permesinan elektrik (27 juta Dolar AS), serta logam dan bijih besi (25 juta Dolar AS). Tentunya total angka tersebut sangat kontras jika dibandingkan dengan tetangga seperti Vietnam yang berhasil meraup manfaat hingga 2,6 miliar Dolar AS. Rendahnya serapan pengalihan perdagangan ini mengonfirmasi adanya hambatan kapasitas produksi dan daya saing industri domestik dalam menggantikan posisi Tiongkok di pasar Amerika Serikat secara masif.

Selain soal struktural, perbedaan signifikan tersebut juga menunjukkan bahwa pengalihan perdagangan pada periode perang dagang pertama berlangsung secara selektif melalui skema *friend-shoring* yang berbasis kedekatan aliansi politik, serta *nearshoring* yang mengandalkan kedekatan geografis. Pola ini menguntungkan mitra strategis yang telah memiliki keterkaitan produksi dengan pasar AS serta dukungan perjanjian perdagangan bebas atau preferensial (*Free Trade Agreement* atau *Regional Trade Agreement*).³² Lima penerima manfaat terbesar didominasi oleh negara-negara dengan karakteristik tersebut, sementara negara yang tidak memenuhi prasyarat tersebut memperoleh porsi manfaat yang lebih terbatas.

Dari data di atas, terlihat bahwa sebagian besar negara yang terdeteksi memanfaatkan pengalihan perdagangan merupakan negara berkembang. LPEM FEB UI dalam studi terbarunya pada tahun 2025 menemukan bahwa pengalihan

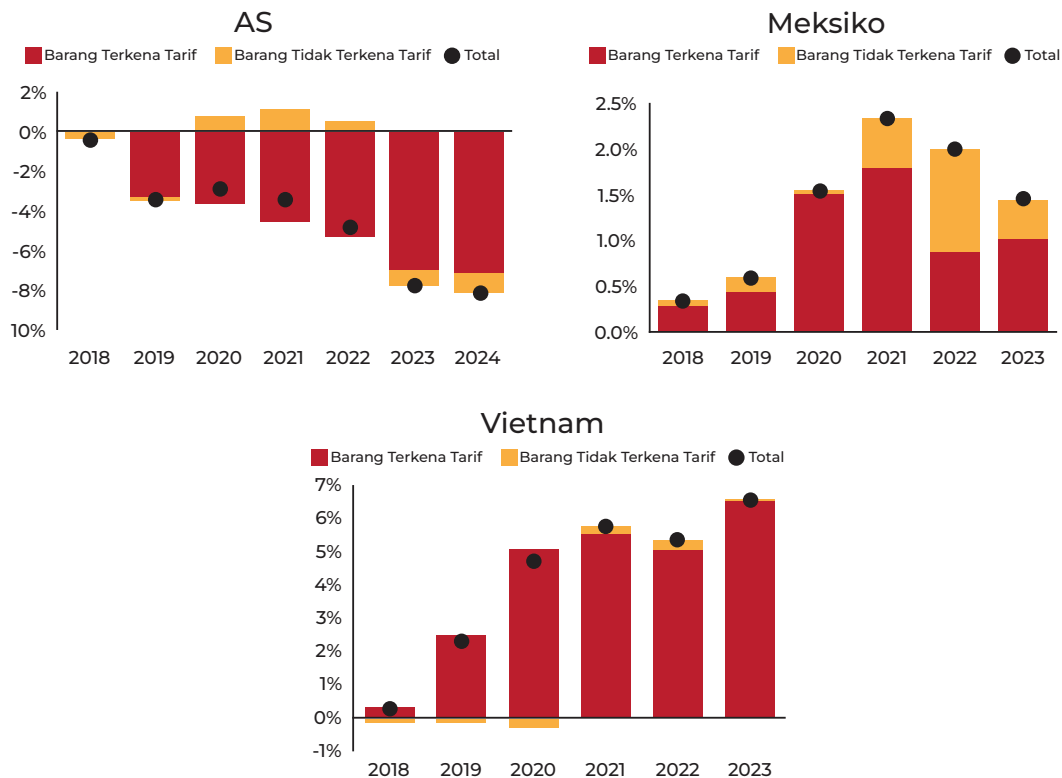
perdagangan atas peningkatan tarif terhadap barang-barang Tiongkok diproyeksi menguntungkan negara berkembang yang mayoritas mengekspor produk seperti kulit, biji minyak, elektronik dan optik, serat nabati, serta pakaian jadi.³³ Pergeseran rantai pasok manufaktur ini menegaskan kembalinya Asia Tenggara dan Asia Selatan sebagai basis industri padat karya dan berbasis komoditas, dengan struktur manufaktur yang relatif sederhana. Sebaliknya, negara berkembang di kawasan Asia lainnya dan Uni Eropa cenderung tetap terkonsentrasi kepada industri berketerampilan tinggi (*high-skilled industry*).

Namun demikian, temuan tersebut perlu dibaca dengan *caveat* penting. Kajian European Central Bank mencatat bahwa perubahan arus perdagangan akibat perang dagang seringkali bersifat sementara. Lebih lanjut, kenaikan volume ekspor tidak secara otomatis mencerminkan aktivitas ekonomi produktif baru atau peningkatan nilai tambah domestik. Dalam konteks ini, terminologi pengalihan arus barang (*trade deflection*), transit barang (*transshipment*), serta praktik penghindaran aturan dagang (*circumvention*) perlu dimaknai secara hati-hati. Meskipun negara ketiga berusaha mengisi kekosongan pasar AS yang ditinggalkan Tiongkok, terdapat risiko bahwa negara tersebut sekadar menjadi titik perlintasan (*drop-off point*) bagi barang Tiongkok untuk menghindari tarif AS, sebagaimana secara empiris ditemukan di Thailand dan Vietnam.³⁴ Fenomena ini diperkuat oleh strategi *China Plus One*, di mana perusahaan tidak sepenuhnya meninggalkan Tiongkok, melainkan mendiversifikasi basis produksinya ke negara tetangga guna memitigasi risiko geopolitik. Bagi negara seperti Vietnam, kedekatan geografis memudahkan integrasi rantai pasok tersebut, meskipun menjadi pembicaraan berbeda soal orisinalitas nilai tambah domestik.

Menggunakan pengalaman perang dagang pertama sebagai contoh, kenaikan impor AS dari Meksiko dan Vietnam nyatanya diikuti oleh peningkatan impor kedua negara tersebut dari Tiongkok, sebagaimana terlihat di Bagan 8. Pola ini mengonfirmasi posisi Meksiko dan Vietnam sebagai penghubung manufaktur regional³⁵ yang memanfaatkan akses pasar mereka ke AS untuk menyalurkan produk Tiongkok dengan nilai tambah domestik yang relatif sederhana.

Strategi industrialisasi berbasis ekspor memang adalah hal yang dikedepankan Tiongkok dalam menyikapi situasi itu. Pada periode pertama perang dagang, proporsi ekspor Tiongkok yang diserap oleh negara-negara G20 mengalami kenaikan dari 43,4 persen pada tahun 2017 menjadi 52,3 persen pada tahun 2023. Bahkan, tercatat bahwa Tiongkok tetap menguasai pangsa nilai tambah manufaktur global (MVA) pada tahun 2018-2023 yang mencapai 3,3 persen. Beberapa negara lain seperti India dan Vietnam hanya mengalami kenaikan 0,1 persen, bahkan turun seperti yang ditemukan di Thailand, Meksiko, dan Korea Selatan.

Bagan 8. Perubahan Impor dari Tiongkok di Beberapa Negara³⁶



Sumber: Rhodium Group (diolah)

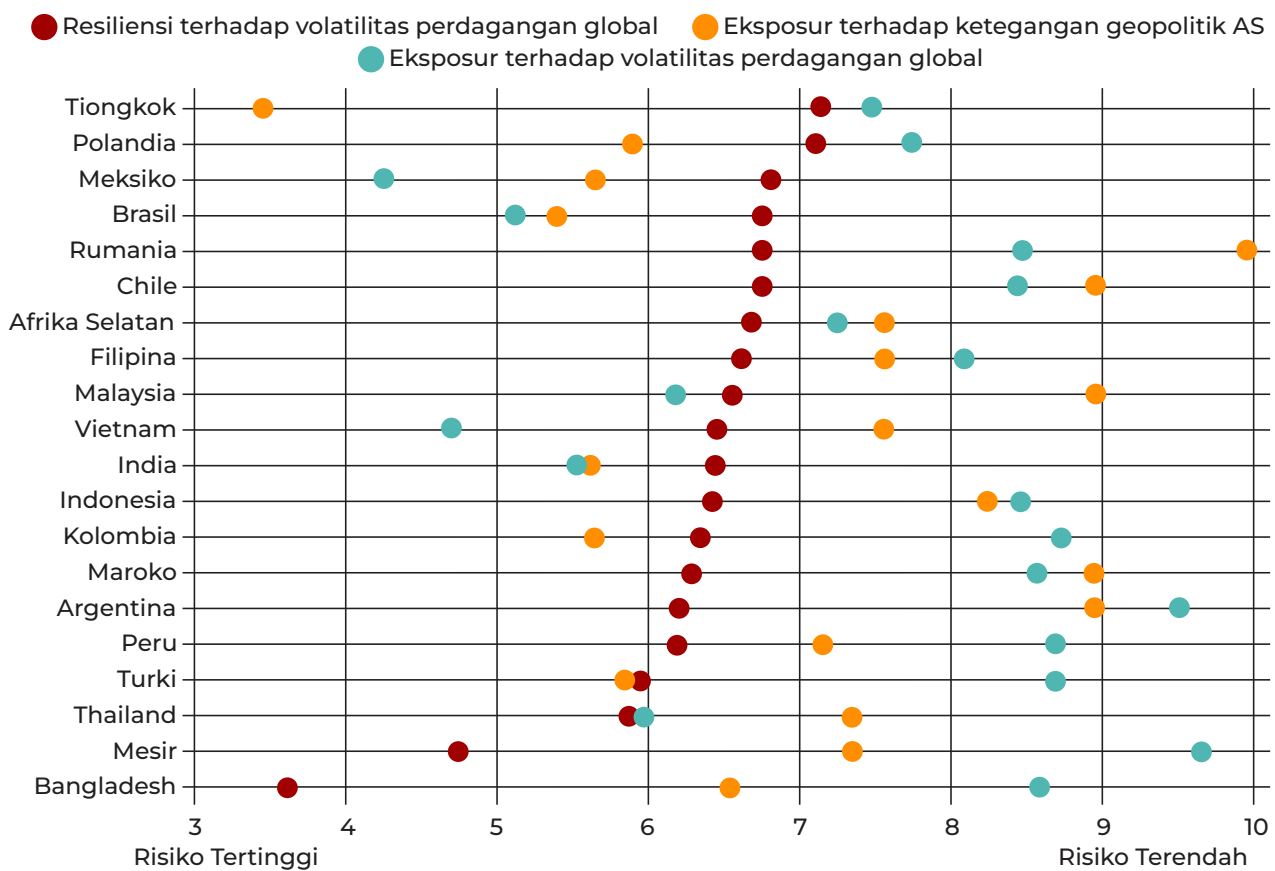
Di tengah pendekatan dagang yang lebih ofensif bagi negara ketiga pada periode perang dagang kedua, pemanfaatan peluang pengalihan perdagangan menjadi jauh lebih kompleks dibandingkan fase sebelumnya. Setiap negara harus menimbang struktur tarif yang mereka hadapi dan memetakan posisi kompetitif mereka *vis-à-vis* negara lain yang berpotensi menggantikan suplai Tiongkok di pasar AS pascapengenaan tarif. Berangkat dari itu, perlu membaca posisi Indonesia secara khusus dengan memperhitungkan ruang peluang serta batasan struktural Indonesia menghadapi kondisi saat ini.

Pemetaan Posisi Indonesia dalam Perdagangan Internasional

Di tengah skenario global yang volatil, Bagan 9 memperlihatkan Indonesia termasuk negara berkembang yang relatif resilien, bersama dengan Tiongkok, Vietnam, dan Meksiko. Penilaian Verisk Maplecroft pada tahun 2025 menunjukkan bahwa ketahanan ini ditopang oleh kombinasi kekuatan ekonomi, stabilitas politik, kualitas regulasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur sehingga memungkinkan negara berkembang menyerap guncangan tarif dan beradaptasi cepat terhadap perubahan geopolitik tanpa kehilangan daya tarik manufaktur.³⁷ Pada saat yang sama, negara-negara dalam kelompok BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa), termasuk Indonesia di dalamnya, juga dinilai memiliki ketahanan struktural yang lebih kuat karena cadangan devisa yang

memadai, tingkat utang yang relatif terkendali, serta pasar domestik yang besar, sehingga memberikan ruang penyesuaian yang lebih luas dibandingkan negara berkembang berskala kecil.

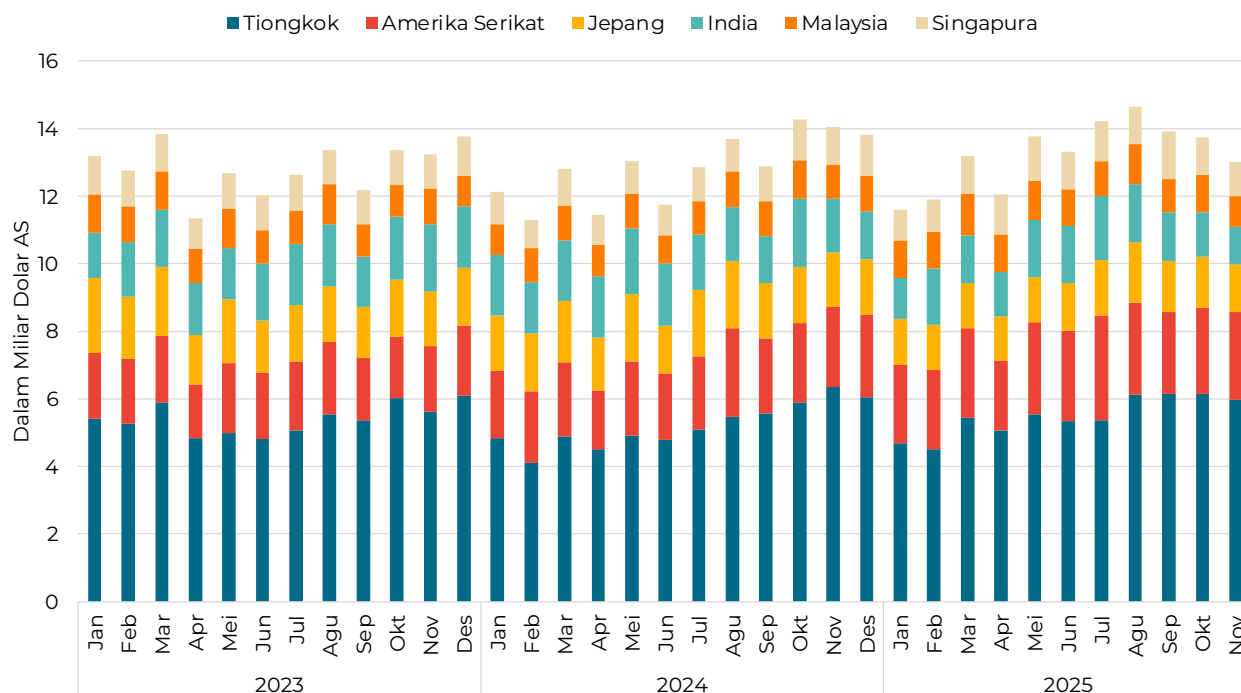
Bagan 9. Resiliensi Negara Berkembang terhadap Gejolak Dunia, 2025³⁸



Sumber: Verisk Maplecroft (diolah)

Berbekal resiliensi makro tersebut, Indonesia bisa dikatakan memiliki daya tahan cukup kuat terhadap efek rambatan dari volatilitas ekonomi dunia. Manifestasi tersebut tercermin dari kemampuan Indonesia mempertahankan stabilitas relasi dagangnya. Sebagaimana diperlihatkan di dalam Bagan 10 mengenai enam mitra dagang terbesar Indonesia, tidak terdapat pergeseran komposisi yang signifikan antara periode sebelum dan sesudah dimulainya perang tarif. Tiongkok tetap menjadi mitra dagang terbesar, dengan pola fluktuasi bulanan yang bergerak dalam rentang yang tidak ekstrem. Per November 2025, Tiongkok menyerap 26,55 persen dari total ekspor Indonesia. Di sisi lain, AS sebagai negara yang menjadi fokus kajian memiliki proporsi 11,45 persen dari total ekspor Indonesia, menjadikannya mitra dagang terbesar kedua. Negara lain seperti Jepang, India, Malaysia, dan Singapura terlihat mempertahankan posisi relatifnya tanpa lonjakan maupun kontraksi secara struktural.

Bagan 10. Pemetaan Ekspor Indonesia Berdasarkan Negara, 2023-2025³⁹



Sumber: Trade Map (diolah)

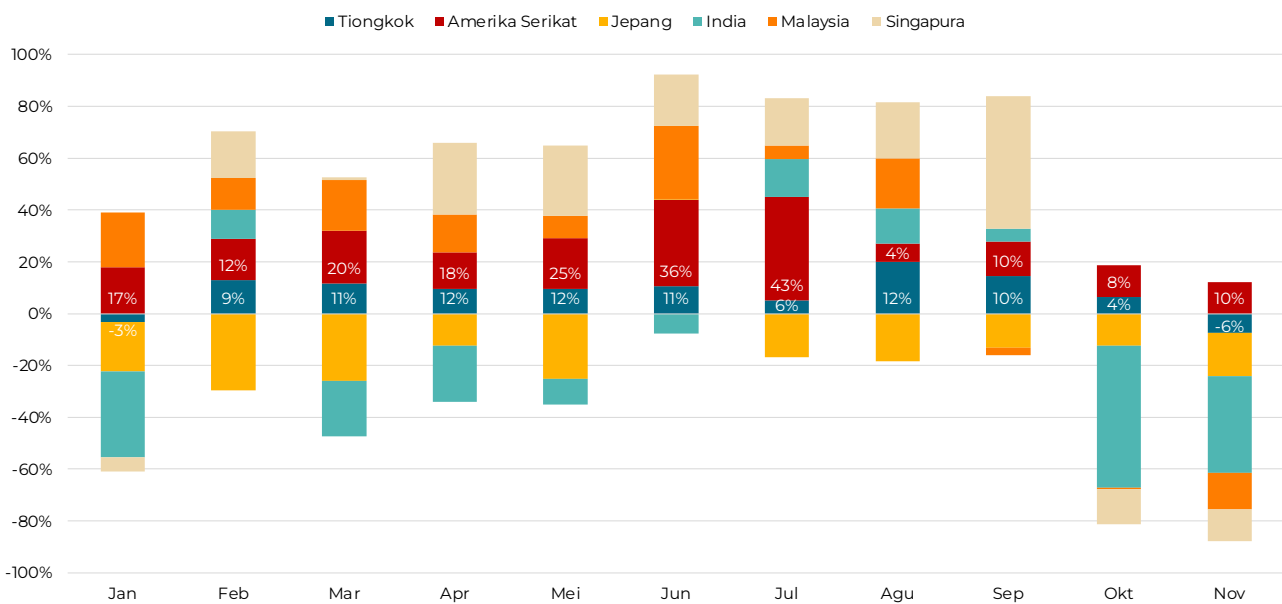
Jauh sebelum eskalasi tarif diberlakukan secara resmi pada April 2025, ekspektasi pasar terhadap kebijakan proteksionisme telah terbentuk sejak pelantikan Trump pada Januari 2025. Antisipasi ini tercermin dari pertumbuhan ekspor Indonesia ke AS yang melonjak hingga 43 persen pada Juli 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Lihat Bagan 11). Di saat yang bersamaan, Drewry World Container Index memperlihatkan kenaikan biaya pengiriman kontainer 40 kaki pada awal tahun 2025 yang mencapai 4.000 Dolar AS.⁴⁰ Temuan itu menjadi salah satu indikasi bagaimana aktivitas *front-loading* terjadi sebagai respons eskalasi tarif, di mana para pelaku usaha mempercepat arus pengiriman sebelum dikenakan biaya tambahan akibat tarif di masa depan.

Namun, intensitas percepatan pembelian ini hanya bertahan selama satu semester. Seiring dengan dinamika tarik-ulur kebijakan di AS, urgensi para importir untuk mempercepat pengadaan barang mulai mereda. Secara deskriptif, fenomena ini menunjukkan bahwa pengalihan perdagangan yang masif hanya berlangsung dalam durasi singkat, sebelum akhirnya volume perdagangan kembali ke level normal (*business as usual*).

Kondisi berbeda terlihat antara hubungan dagang dengan Tiongkok, di mana kenaikan ekspor Indonesia relatif stabil di kisaran 12 persen. Meskipun demikian, data per November 2025 menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan ekspor kepada negara tersebut. Tren penurunan ini sejalan dengan melemahnya kondisi ekonomi domestik Tiongkok yang mencapai level terendah dalam tiga tahun terakhir,⁴¹ sehingga menekan daya serap pasar mereka terhadap komoditas global.

Pola perdagangan Indonesia pascapengenaan tarif juga menunjukkan catatan menarik di pasar Singapura. Indonesia meningkatkan ekspor secara signifikan ke Singapura dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 27 persen selama periode April hingga September 2025. Lonjakan ini kemudian berbalik menjadi kontraksi hampir 10 persen pada bulan-bulan berikutnya. Fenomena tersebut dapat dipahami sebagai indikasi aktivitas *re-exporting* atau *transshipment* melalui hub Singapura selama periode puncak ketidakpastian tarif. Dalam skema ini, komoditas Indonesia ditumpuk terlebih dahulu di Singapura sebelum didistribusikan kembali ke pasar global. Di sisi lain, kontraksi yang terjadi pasca-September menandai dua kemungkinan, yakni antara pasar domestik Singapura yang menyentuh titik jenuh ataupun normalisasi arus logistik setelah gelombang *front-loading* berakhir.

Bagan 11. Laju Pertumbuhan Ekspor (YoY) Indonesia terhadap Enam Mitra Dagang Terbesar, 2024-2025⁴²

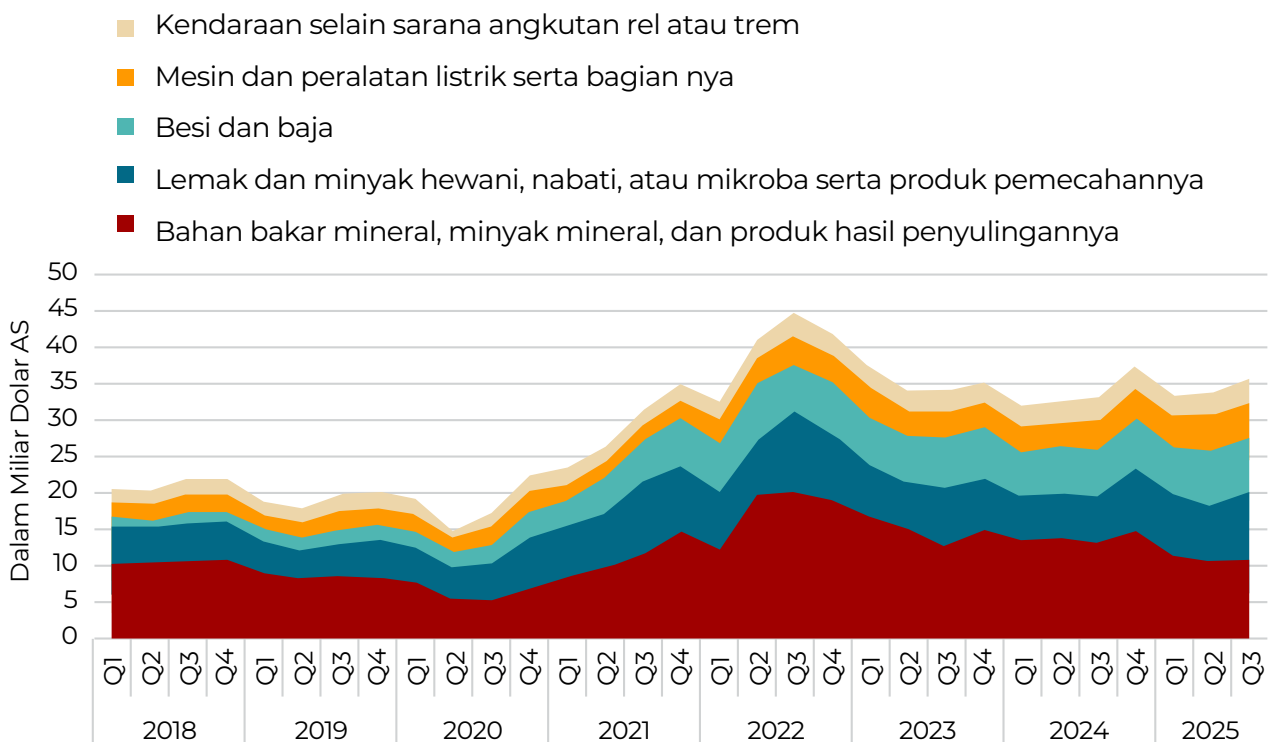


Sumber: Trade Map (diolah)

Dari sisi komposisi produk, struktur ekspor Indonesia masih didominasi oleh komoditas berbasis sumber daya alam dan manufaktur menengah. Sebagaimana terlihat dalam Bagan 12, tren pada semester pertama tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar produk utama mengalami tekanan, di mana komoditas bahan bakar mineral serta lemak dan minyak hewan/nabati masih menjadi kontributor volume terbesar meski terjadi tren melandai dibandingkan puncaknya pada tahun 2022. Sebaliknya, sektor mesin dan peralatan listrik mencatatkan pertumbuhan terbatas di tengah kelesuan sektor lainnya. Pola ini mengindikasikan bahwa dampak perang dagang tidak terdistribusi merata antarsektor. Komoditas sumber daya alam (seperti bahan bakar mineral dan lemak/minyak nabati) memberikan volume ekspor yang masif, namun sangat rentan terhadap volatilitas harga dan penurunan permintaan global seperti apa yang terjadi setelah puncak komoditas tahun 2022.

Lain halnya dengan sektor mesin dan peralatan listrik yang menunjukkan pertumbuhan lebih stabil, meskipun volumenya jauh lebih kecil. Sebagai salah satu sektor yang memiliki keterkaitan GVC lebih dalam dibandingkan sektor unggulan Indonesia lainnya, sektor mesin dan elektronik di satu sisi memang lebih sensitif terhadap disrupsi eksternal karena berkaitan dengan proses produksi ataupun perakitan yang melibatkan banyak pemasok. Namun, sektor ini memiliki resiliensi lebih tinggi dalam menangkap peluang pengalihan perdagangan dibandingkan komoditas mentah. Akan tetapi, pendalaman industri Indonesia soal manufaktur menengah masih menjadi persoalan yang menghambat optimalisasi peluang tersebut.

Bagan 12. Lima Teratas Produk Ekspor Indonesia⁴³



Sumber: Trade Map (diolah)

Meskipun skala ekonomi Indonesia terpaut jauh dari Tiongkok, posisi Indonesia dalam peta perdagangan global tidak sepenuhnya berada di luar pusaran dinamika perang dagang AS-Tiongkok. Struktur ekspor Indonesia ke Amerika Serikat menunjukkan derajat keserupaan yang cukup signifikan dengan Tiongkok, khususnya untuk sektor manufaktur padat karya dan teknologi menengah. Data per November 2025 mengonfirmasi bahwa kedua negara memiliki mesin listrik serta peralatannya sebagai komoditas unggulan utama ke pasar AS (Lihat Bagan 13). Walaupun secara nilai terdapat disparitas tajam di mana Tiongkok sebesar 9,28 miliar Dolar AS sementara Indonesia sebesar 615,5 juta Dolar AS. Kemiripan profil ini merupakan prasyarat dimungkinkannya pengalihan perdagangan atas tensi dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Pendalaman analisis menunjukkan bahwa peluang Indonesia terletak dari kemampuan substitusi produk Tiongkok yang terkena tarif tinggi di pasar AS, khususnya terhadap komoditas pakaian jadi (232,0 juta Dolar AS) dan alas kaki (240,1 juta Dolar AS) yang merupakan andalan ekspor nasional. Keberhasilan menangkap momentum ini berpotensi meningkatkan keterkaitan perdagangan dengan Amerika Serikat yang sejauh ini masih relatif terbatas, di mana dependensi Indonesia terhadap ekspor ke AS secara empiris lebih rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya (kurang dari 10 persen total ekspor).⁴⁴ Namun, studi ini tidak menepis fakta bahwa peningkatan kapasitas produksi untuk menyerap limpahan permintaan secara masif masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia.

Bagan 13. Perbandingan Produk Ekspor Tiongkok (Atas) dan Indonesia (Bawah) ke Amerika Serikat, November 2025 (dalam Juta Dolar AS)⁴⁵

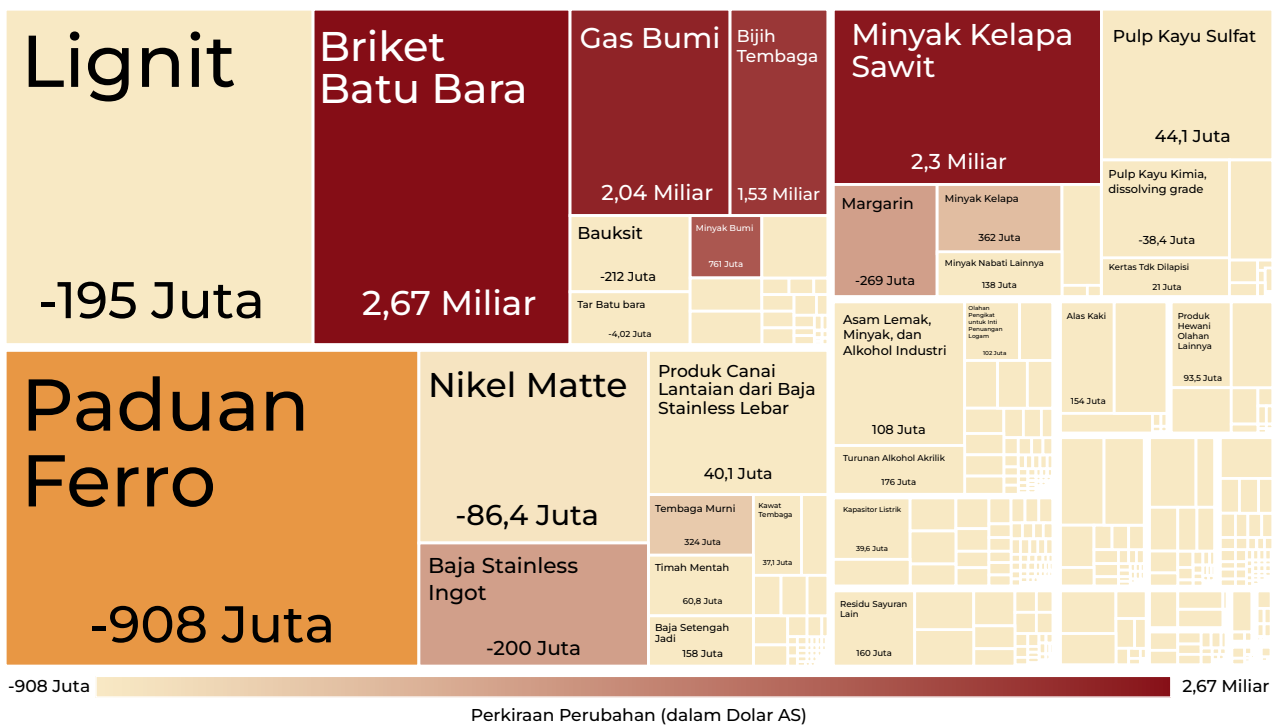


Sumber: Trade Map (diolah)

Situasi semakin diperumit oleh kenyataan bahwa Indonesia juga terdampak langsung oleh kebijakan tarif. Meski tengah mengupayakan negosiasi penurunan tarif bea masuk resiprokal, penetapan tingkat tarif 19 persen saat ini tetap memberikan tekanan signifikan bagi sektor-sektor yang memiliki keserupaan profil dengan Tiongkok. Dampak tersebut bahkan bersifat struktural. Mengingat industri di sektor-sektor ini menyerap banyak tenaga kerja, disrupsi tarif berpotensi membawa implikasi ketenagakerjaan yang tidak ringan.

Kajian ini menyadari bahwa membaca dampak perang dagang tidak cukup secara normatif diejawantahkan melalui perubahan ekspor secara langsung, terlebih struktur ekspor Indonesia ke AS relatif terbatas dan dikenai tarif langsung yang bersifat seragam bagi semua sektor. Menjelaskan posisi Indonesia dalam dinamika perdagangan dunia saat ini juga perlu membahas perubahan pola perdagangan yang tercipta, utamanya terkait konteks dampak tidak langsung yang ditransmisikan melalui rantai pasok global.

Bagan 14. Efek Tarif Tidak Langsung: Proyeksi Perubahan Ekspor Indonesia ke Tiongkok⁴⁶



Sumber: The Observatory of Economic Complexity (diolah)

Sebagaimana efek tarif kumulatif bekerja, negara-negara yang tidak secara langsung menjadi target tarif dapat terdampak ekspornya jika barang-barang mereka termasuk dalam nilai tambah ekspor dari negara lain. Untuk lebih menggambarkan mekanisme yang mendasarinya, kajian menyoroti Tiongkok sebagai mitra dagang utama Indonesia dan negara yang berperan besar dalam GVC. Dengan menitikberatkan peran keterkaitan ke depan (*forward participation*) dalam GVC, Indonesia dapat terpengaruh guncangan tidak langsung dari melemahnya permintaan Tiongkok (Lihat Bagian 14). Beberapa komoditas hulu

yang diekspor dari Indonesia ke Tiongkok seperti Paduan Ferro atau Ferroalloy (14,4 miliar Dolar AS), Lignit (10,2 miliar Dolar AS), Briket Batubara (6,79 miliar Dolar AS), Nikel Matte (5,29 miliar Dolar AS), dan Minyak Sawit (3,79 miliar Dolar AS) menghadapi potensi penurunan karena berkurangnya ekspor Tiongkok ke AS setelah pemberlakuan tarif.⁴⁷ Ini termasuk sektor-sektor seperti kendaraan listrik yang sangat bergantung kepada nikel Indonesia. Akibatnya, Indonesia berisiko mengalami pukulan ganda, yakni berkurangnya ekspor langsung ke AS dan perlambatan sekunder dalam permintaan dari Tiongkok.

Tidak hanya itu, transmisi perang dagang AS-Tiongkok juga dijelaskan sebagai tekanan biaya yang melalui perubahan rantai pasok dapat menciptakan rambatan bagi sektoral Indonesia. Ketergantungan yang tinggi kepada bahan baku dan barang antara yang diimpor dari Tiongkok membuat sebagian industri domestik rentan terhadap kenaikan harga input, gangguan pasokan, serta perubahan pola perdagangan yang bersifat eksogen terhadap kebijakan nasional. Dampak ini cenderung lebih besar terhadap sektor-sektor dengan intensitas impor yang tinggi, seperti manufaktur logam dasar, pertambangan batu bara dan lignit, serta komoditas penghasil energi lainnya (Lihat Lampiran 3).⁴⁸

Pengalihan Perdagangan ke Indonesia di Tengah Disrupsi Perang Dagang

Perang dagang AS–Tiongkok bekerja melalui mekanisme yang tidak linier terhadap negara ketiga seperti Indonesia. Pengenaan tarif oleh Amerika Serikat mendorong Tiongkok melakukan reorientasi perdagangan, baik melalui pengalihan pasar ekspor maupun penyesuaian struktur rantai pasok regional. Dalam konteks ini, tekanan perdagangan global meningkatkan insentif pemindahan produksi ke negara ketiga, tetapi realisasinya sangat bergantung kepada biaya perdagangan efektif dan kesiapan industri domestik. Bagi Indonesia, dampak yang muncul tidak hanya berbentuk peluang ekspor akhir ke pasar AS, tetapi juga berpengaruh kepada hubungan dagang dengan Tiongkok sebagai bagian dari penyesuaian rantai nilai regional.

Fokus analisis kajian diarahkan kepada pengukuran potensi pengalihan perdagangan, khususnya dari ekspor Tiongkok ke Amerika Serikat sebelum tarif diberlakukan, menuju potensi tambahan ekspor Indonesia ke pasar Amerika Serikat. Kajian ini tidak mencakup analisis perpindahan perdagangan Indonesia yang menggantikan barang-barang Amerika Serikat di pasar Tiongkok, meskipun kedua negara saling melakukan retaliasi tarif pada kondisi terbaru. Sebab kajian tidak menganalisis lebih jauh soal *trade deflection* via negara ketiga. Lebih lanjut, perbedaan yang signifikan antara profil ekspor Indonesia dan Amerika Serikat di pasar Tiongkok juga menjadi sebuah pertimbangan bahwa mekanisme perbandingan tidak bersifat simetris.

Secara metodologis, kajian menggunakan data ekspor barang berdasarkan HS 6 digit yang kemudian dikonversi ke dalam klasifikasi Broad Economic Category (BEC) revisi 5. Konversi ini dilakukan untuk menyederhanakan klasifikasi sektor

menjadi delapan kelompok utama serta untuk membedakan jenis barang berdasarkan fungsinya dalam perekonomian, yakni barang konsumsi antara, barang Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan barang konsumsi akhir. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih terarah untuk menangkap pergeseran peran Indonesia dalam rantai nilai global, tidak semata-mata terbatas kepada perubahan nilai perdagangan agregat.

Tabel 1. Nama dan Keterangan Sektor BEC rev.5

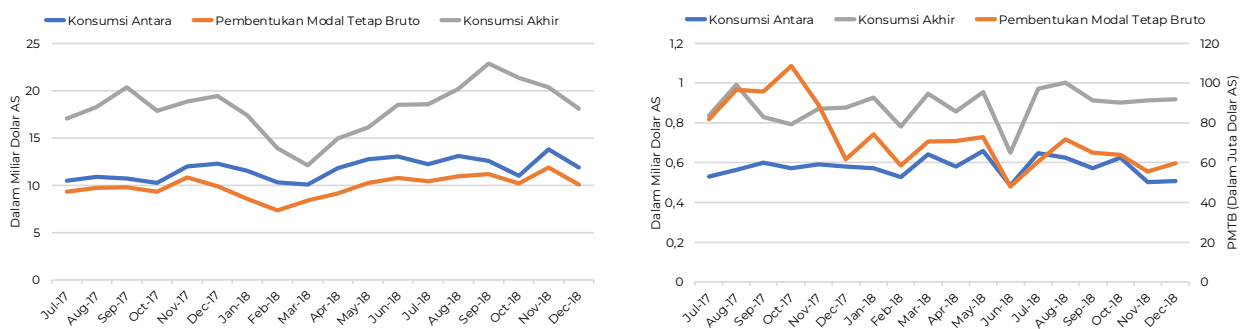
Nama	Keterangan
Sektor 1	Pertanian, kehutanan, perikanan, makanan, minuman, tembakau
Sektor 2	Pertambangan, penggalian, kilang, bahan bakar, bahan kimia, listrik, air, pengolahan limbah
Sektor 3	Konstruksi, kayu, kaca, batu, logam dasar, perumahan, peralatan listrik, furnitur
Sektor 4	Tekstil, pakaian, alas kaki
Sektor 5	Peralatan dan layanan transportasi, perjalanan, layanan pos
Sektor 6	TIK, media, komputer, layanan bisnis dan keuangan
Sektor 7	Kesehatan, farmasi, pendidikan, kebudayaan, olahraga
Sektor 8	Pemerintahan, militer, dan lainnya

Analisis deskriptif diawali dengan menelaah periode perang dagang pertama pada 2018, yang kemudian dilanjutkan untuk periode kedua pada 2025. Penelaahan dilakukan dengan melihat dinamika perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai pihak yang terdampak paling signifikan. Selanjutnya, kajian akan meninjau posisi Indonesia sebagai negara yang berpotensi terdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui *spillover* dari hubungan dagang keduanya. Mengingat dampak riil kebijakan pada eskalasi kedua belum sepenuhnya terobservasi akibat adanya penundaan implementasi tarif, analisis difokuskan kepada perubahan nilai ekspor dan impor antarnegara terkait sebagai indikator awal pergeseran pola perdagangan.

Dinamika Ekspor dan Impor pada Perang Dagang Pertama

Data menunjukkan bahwa ekspor Tiongkok ke Amerika Serikat mengalami penurunan sementara pada awal implementasi tarif, sebelum sempat pulih pada pertengahan tahun dan kembali melemah pada akhir tahun (Lihat Bagan 15 Kiri). Pola ini relatif seragam di seluruh kategori barang. Namun, dinamika tersebut tidak diikuti oleh peningkatan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Sepanjang 2018, ekspor Indonesia cenderung bergerak stagnan dan volatil tanpa tren kenaikan yang berarti (Lihat Bagan 15 Kanan). Temuan ini mengindikasikan bahwa pada perang dagang pertama, Indonesia hanya sedikit memperoleh limpahan permintaan dari penurunan ekspor Tiongkok ke pasar Amerika Serikat. Temuan cukup sejalan dengan sejumlah penelitian yang mendeteksi hal serupa pada periode perang dagang pertama.

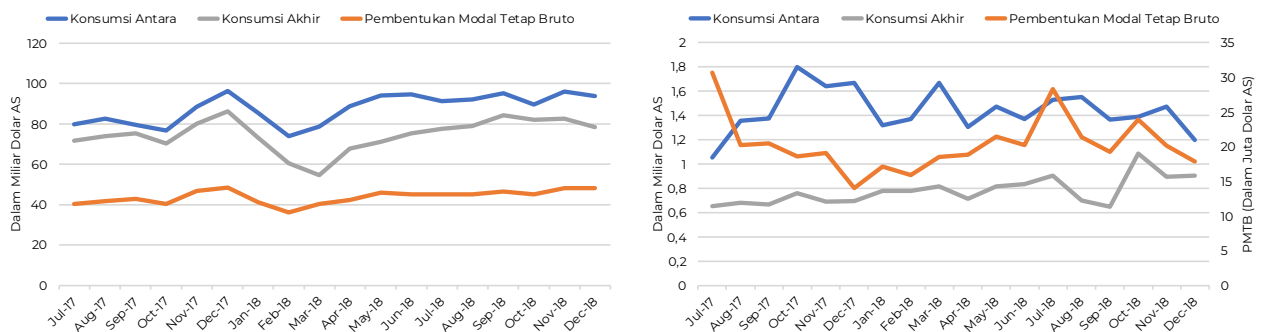
Bagan 15. Nilai Ekspor Tiongkok (Kiri) dan Indonesia (Kanan) ke Amerika Serikat, Juli 2017-Desember 2018⁴⁹



Sumber: Trade Map (diolah)

Pada saat yang sama, ekspor Tiongkok ke dunia hanya mengalami penurunan sesaat sebelum kembali stabil dan meningkat (Lihat Bagan 16 Kiri), yang menandakan bahwa pelemahan akses ke pasar AS belum sepenuhnya mengguncang kapasitas ekspor global Tiongkok. Sejalan dengan itu, ekspor Indonesia ke Tiongkok juga tidak menunjukkan perubahan signifikan dan tetap bergerak dalam kisaran yang relatif sama (Lihat Bagan 16 Kanan). Penurunan tajam ekspor PMTB Indonesia ke Tiongkok yang mencapai titik terendahnya pada paruh kedua 2017 tidak hanya terjadi secara tunggal dari eskalasi tarif yang dimulai pada awal 2018. Laporan World Bank tentang *China Economic Update* menyampaikan bahwa kontribusi pertumbuhan Tiongkok dari investasi pada periode tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sebagian besar didorong oleh upaya pemerintah setempat untuk membatasi pembiayaan investasi publik di luar anggaran pemerintah daerah, yang kala itu postur fiskal Tiongkok diarahkan untuk memitigasi risiko utang sistemik. Pada saat bersamaan, investasi dari sektor swasta juga mengalami pelemahan.⁵⁰ Dengan demikian, pada perang dagang pertama, baik dari sisi pasar AS maupun Tiongkok, belum terlihat mekanisme pengalihan perdagangan yang menguntungkan Indonesia secara signifikan.

Bagan 16. Nilai Ekspor Tiongkok ke Dunia (Kiri) dan Ekspor Indonesia ke Tiongkok (Kanan)⁵¹



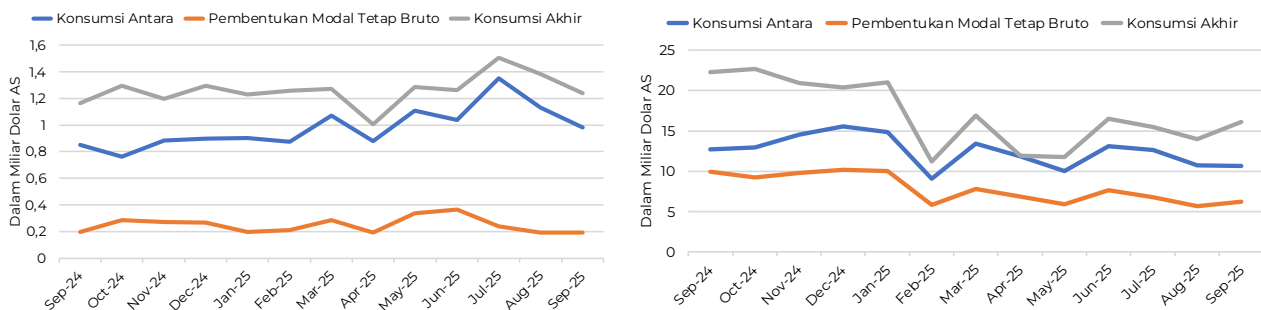
Sumber: Trade Map (diolah)

Dinamika Ekspor dan Impor pada Perang Dagang Kedua

Memasuki perang dagang kedua pada awal 2025, dinamika perdagangan berubah secara lebih tajam. Sejak Januari 2025, ekspor Tiongkok ke Amerika Serikat mengalami kontraksi signifikan, dengan penurunan terdalam terjadi bahkan sebelum Liberation Day (Lihat Bagan 17 Kiri). Hingga Februari 2025, penurunan terbesar terjadi kepada barang konsumsi akhir (46,59 persen), diikuti oleh PMTB (41,53 persen), dan barang konsumsi antara (38,92 persen). Pola ini mencerminkan respons antisipatif (*forward-looking*), dengan penurunan sudah terjadi lebih awal karena pelaku usaha menyesuaikan produksi dan pengiriman sebelum tarif besar efektif berlaku. Akibatnya, saat tarif meningkat pada April 2025, dampak marginal pada bulan-bulan setelahnya relatif lebih kecil karena sebagian penyesuaian sudah terjadi sebelumnya melalui substitusi pasar dan penyesuaian inventori.

Berbeda dengan Tiongkok, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat pada periode yang sama tidak menunjukkan perubahan signifikan (Lihat Bagan 17 Kanan). Penurunan baru terlihat pada April 2025 yang dipicu oleh guncangan tak terduga ketika tarif AS mulai menyasar negara-negara selain Tiongkok. Namun tekanan tersebut bersifat sementara. Ekspor Indonesia berangsur pulih seiring dengan penundaan implementasi tarif, bahkan sempat melampaui level pra-tarif, yang mengindikasikan adanya percepatan ekspor (*front-loading*) sebagai respons antisipatif terhadap potensi kenaikan tarif, sebelum kembali melemah dan stabil.

Bagan 17. Nilai Ekspor Tiongkok (Kiri) dan Indonesia (Kanan) ke Amerika Serikat, September 2024-2025



Sumber: Trade Map (diolah)

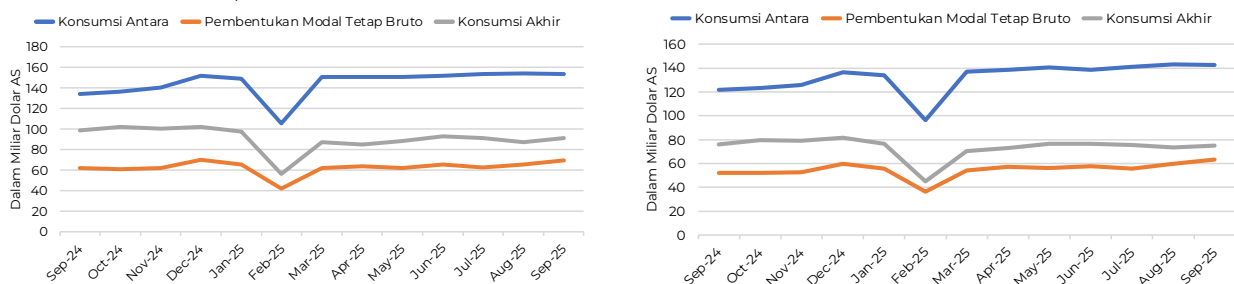
Keterangan: Latar berwarna biru menunjukkan periode pengenaan tarif Trump sebesar 10 persen yang efektif berlaku pada 4 Februari 2025. Sementara latar berwarna abu-abu menunjukkan periode tarif resiprok pada Liberation Day yang diumumkan sejak April 2025.

Dari sisi komposisi, dampak terbesar tarif terhadap ekspor Indonesia terjadi terhadap barang PMTB yang mengalami kontraksi paling dalam sebesar 32,56 persen. Hal ini mengindikasikan adanya penundaan keputusan investasi, di mana meningkatnya ketidakpastian mendorong pelaku usaha AS menunda keputusan investasi. Sementara itu, penurunan untuk barang konsumsi antara (20,83 persen) dan barang konsumsi akhir (17,89 persen) relatif lebih terbatas. Sebagai komparasi dengan kondisi Tiongkok, pada periode yang sama nilai

ekspor Tiongkok ke Amerika Serikat mengalami penurunan sebesar 11,96 persen untuk barang PMTB, 11,82 persen untuk barang konsumsi antara dan 29,29 persen untuk barang konsumsi akhir. Persentase penurunan Tiongkok pada bulan April terlihat lebih kecil karena Tiongkok telah mengalami penurunan terlebih dahulu pada bulan Februari, dan sebagai catatan nilai ekspor ketiga jenis barang tersebut telah pulih untuk Indonesia dan belum untuk Tiongkok pada periode setelahnya. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa pemulihan ekspor Indonesia lebih bersifat sementara akibat meredanya tekanan tarif, bukan peningkatan yang bersifat struktural dan persisten.

Penurunan nilai ekspor Tiongkok ke Amerika Serikat pada Februari 2025 memiliki implikasi signifikan terhadap kinerja ekspor Tiongkok secara agregat (Lihat Bagan 18 Kiri). Penurunan paling besar terjadi untuk barang konsumsi akhir sebesar 42,41 persen, yang disusul oleh barang PMTB dan barang konsumsi antara masing-masing 35,62 persen dan 29,29 persen. Namun, terdapat poin yang perlu dicermati. Besarnya penurunan ekspor Tiongkok ke dunia jauh melampaui penurunan ekspornya terhadap Amerika Serikat, sebagaimana tercermin dari Bagan 18 (Kanan) yang memperlihatkan penurunan ekspor Tiongkok ke negara-negara selain Amerika Serikat. Hal ini mengindikasikan bahwa pelemahan permintaan terhadap barang Tiongkok bersifat lebih luas, dengan negara-negara lain di luar AS turut mengurangi impor bahkan sebelum Liberation Day. Menariknya, data Maret 2025 menunjukkan ekspor Tiongkok ke dunia mulai pulih, meskipun ekspor ke AS belum kembali ke level awal. Ketidakselarasan ini menunjukkan bahwa Tiongkok merespons tekanan tarif dengan mengalihkan arus perdagangannya ke pasar strategis selain AS. Salah satu negara yang diperkirakan terdampak dari reorientasi ini adalah Indonesia.

Bagan 18. Nilai Ekspor Tiongkok ke Dunia (Kiri) dan ke Negara Lain selain AS (Kanan), September 2024-2025



Sumber: Trade Map (diolah)

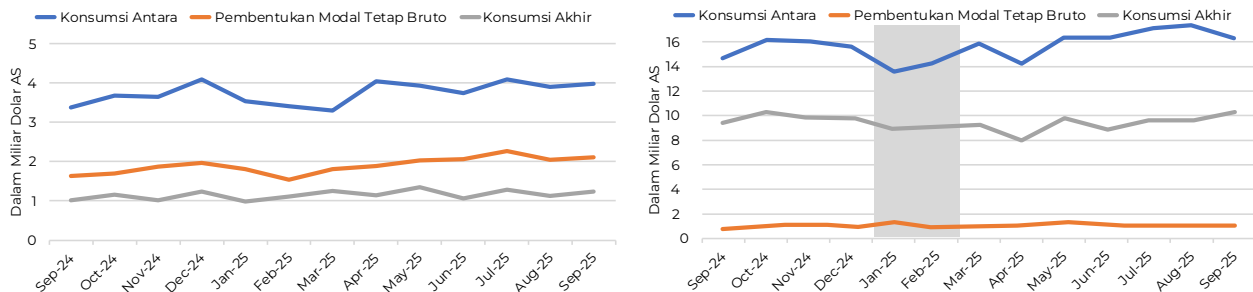
Data impor Indonesia dari Tiongkok menunjukkan adanya peningkatan di seluruh kategori barang (Lihat Bagan 19 Kiri), terutama barang konsumsi antara (3,6 persen) dan PMTB (2,91 persen). Kenaikan ini tidak mengherankan sebab reorientasi ekspor cenderung mengarah ke negara dengan struktur *Relative Preferential Margin* (RPM) yang lebih kompetitif.⁵² RPM didefinisikan sebagai selisih antara tarif yang dikenakan suatu negara terhadap mitra dagang tertentu dibandingkan dengan tarif rata-rata yang dikenakan kepada seluruh mitra dagang lainnya. Dalam konteks perang dagang AS-Tiongkok, ketika AS

menaikkan tarif secara masif terhadap produk Tiongkok, nilai RPM Indonesia bagi Tiongkok menjadi lebih menarik. Hal ini mendorong produsen Tiongkok untuk mengalihkan pasokan mereka ke Indonesia yang memiliki hambatan tarif lebih rendah.

Salah satu indikasi ini terlihat dari kenaikan impor Indonesia dari Tiongkok yang konsisten terjadi sejak 2024, meski sempat mengalami fluktuasi pada Februari dan Maret 2025. Lebih lanjut, kenaikan impor Indonesia atas segala barang dari Tiongkok mampu menyampaikan dua hal. Pertama, terjadi kenaikan dependensi ekspor terhadap komponen impor barang antara yang pada tahun 2022 mencapai 24,88 persen (Lihat Lampiran 3). Kedua, kenaikan impor menjadi salah satu sinyal *transshipment*, meskipun tulisan belum memetakan secara jelas untuk barang-barang impor apa saja yang berhasil mencapai pasar AS via Indonesia.

Di sisi lain, kenaikan impor input dari Tiongkok tidak diikuti oleh kenaikan output akhir yang diekspor Indonesia secara komplementer. Hal ini terlihat dari Bagan 19 (Kanan) bahwa posisi Indonesia di mata dunia lebih dititikberatkan sebagai pemasok input produksi. Tren semacam ini menciptakan potensi perlambatan ekspor Indonesia ke depannya apabila kebijakan tarif semakin keras dan memanas, mengingat efeknya berimplikasi kepada penurunan permintaan bahan baku Tiongkok dari Indonesia.

Bagan 19. Nilai Impor Indonesia dari Tiongkok (Kiri) dan Ekspor Indonesia ke Dunia (Kanan), September 2024-2025

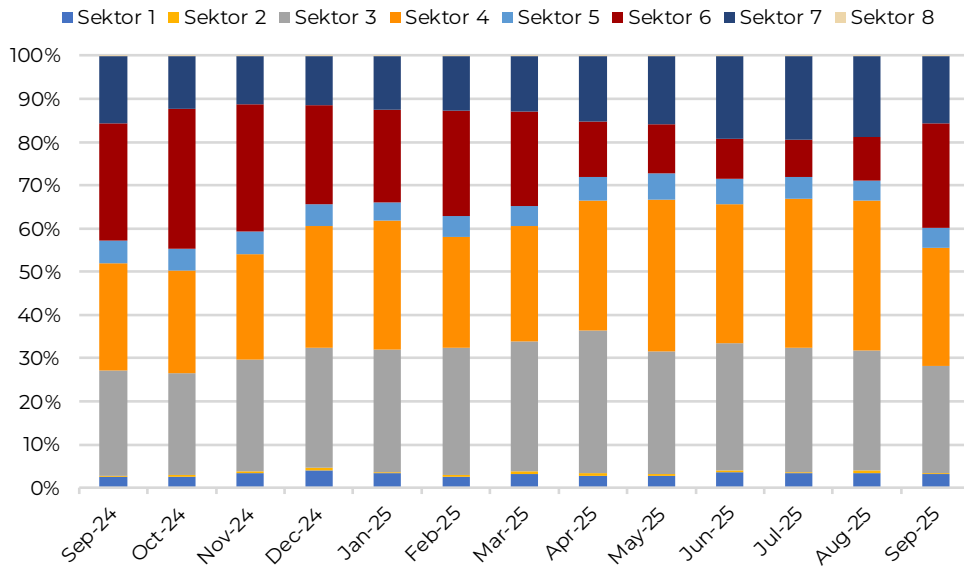


Sumber: Trade Map (diolah)

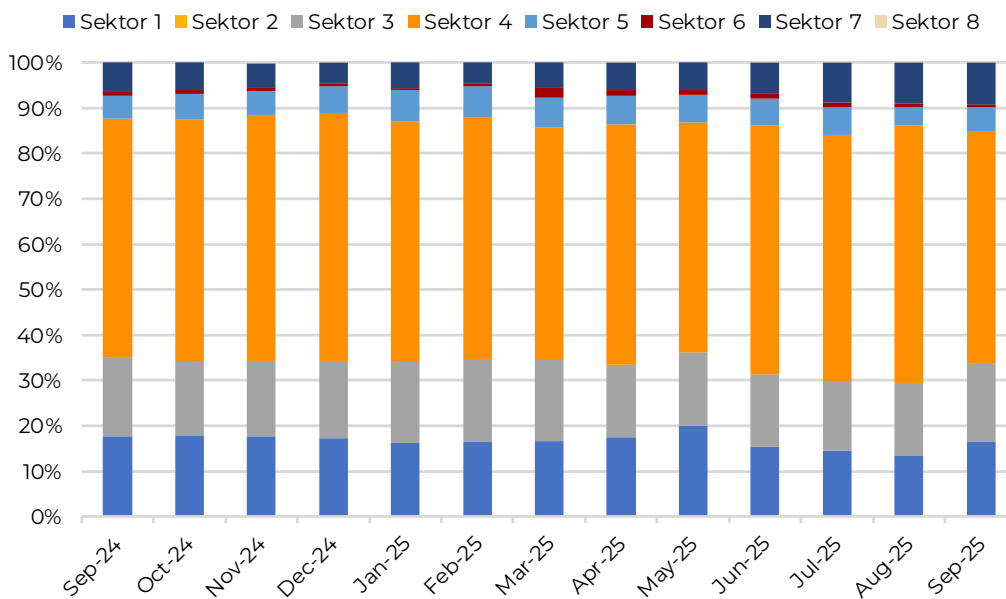
Bagian selanjutnya berusaha membedah dinamika sektor ekspor. Sektor ekspor Tiongkok ke Amerika Serikat yang paling terdampak tarif Trump 2.0 belum menjadi sumber peluang yang dapat dimanfaatkan Indonesia. Merujuk Bagan 20, terlihat bahwa sektor 6 (TIK, media, komputer, layanan bisnis dan keuangan) mengalami penurunan proporsi paling signifikan dari keseluruhan ekspor pasca-Liberation Day. Diversifikasi impor AS yang lebih tinggi di sektor ini kemungkinan dijelaskan oleh kebijakan non-tarif maupun faktor geopolitik seperti antisipasi potensi perubahan kebijakan di masa depan mengingat sifatnya yang sangat strategis.⁵³ Secara tidak langsung, bisa dikatakan bahwa barang sektor TIK merupakan sektor dengan potensi pengalihan paling besar ke Indonesia. Namun, sebagaimana terlihat dalam Bagan 21, proporsi sektor 6 dalam ekspor Indonesia ke Amerika Serikat belum mengalami peningkatan per

September 2025. Kegagalan ini tidak bersifat insidental, tetapi mencerminkan bagaimana keterbatasan struktural Indonesia belum mampu memanfaatkan peluang tersebut. Terlebih ekspor Indonesia selama ini masih terkonsentrasi di proses hilir ataupun *assembling*, sementara belum memiliki industri hulu seperti semikonduktor sebagaimana yang dimiliki oleh negara tetangga Malaysia.⁵⁴

Bagan 20. Struktur Ekspor Tiongkok ke Amerika Serikat



Bagan 21. Struktur Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat



Sumber: Trade Map (diolah)

Keterangan: **Sektor 1:** Pertanian, kehutanan, perikanan, makanan, minuman, tembakau; **Sektor 2:** Pertambangan, penggalian, kilang, bahan bakar, bahan kimia, listrik, air, pengolahan limbah; **Sektor 3:** Konstruksi, kayu, kaca, batu, logam dasar, perumahan, peralatan listrik, furnitur; **Sektor 4:** Tekstil, pakaian, alas kaki; **Sektor 5:** Peralatan dan layanan transportasi, perjalanan, layanan pos; **Sektor 6:** TIK, media, komputer, layanan bisnis dan keuangan; **Sektor 7:** Kesehatan, farmasi, pendidikan, kebudayaan, olahraga; **Sektor 8:** Pemerintahan, militer, dan lainnya

Studi kasus singkat tersebut menjelaskan mengapa meski struktur ekspor lintas sektor Indonesia dan Tiongkok ke AS relatif serupa, tingkat kemiripan produk Indonesia yang rendah (secara standar dan fungsi) tidak membuat Indonesia menerima aliran ekspor. Perbedaan kedalaman basis manufaktur dan integrasi Indonesia dalam rantai nilai global membuat upaya substitusi ekspor Tiongkok ke pasar AS menghadapi kendala struktural. Dalam banyak sektor, peningkatan ekspor Indonesia juga mencerminkan pergeseran jalur perdagangan atau aktivitas perakitan sederhana dibandingkan pembentukan kapasitas produksi baru.

Di sisi lain, persepsi global terhadap Indonesia masih lebih kuat sebagai pasar konsumsi dan pemasok bahan baku, bukan sebagai pusat manufaktur yang mampu menggantikan peran Tiongkok secara cepat dalam skala besar. Untuk menilai implikasi secara lebih realistis, pendalaman secara inferensial dengan generalisasi empiris diperlukan agar ke depannya mampu merancang strategi apabila terdapat perubahan tarif kembali. Sebagai catatan, analisis inferensial tidak dimaksudkan sebagai prediksi jangka pendek, melainkan sebagai pembacaan pola penyesuaian perdagangan yang berulang dalam konteks guncangan tarif.

Pendalaman Analisis Inferensial

Model dalam penelitian ini berusaha menangkap bagaimana guncangan tarif Amerika Serikat terhadap Tiongkok memengaruhi ekspor Tiongkok sebagai negara yang dikenai dampak langsung, sekaligus mengidentifikasi apakah Indonesia mengalami efek tidak langsung (*spillover*) melalui mekanisme seperti pengalihan perdagangan dan penyesuaian dalam GVC. Proyeksi empiris ini diposisikan sebagai proses penyesuaian bertahap posisi Indonesia yang mencerminkan interaksi antara kesiapan internal (struktur ekspor dan kapasitas produksi) dan respons eksternal pelaku perdagangan global. Dalam kerangka ini, *Impulse Response Function* (IRF) dilakukan sebagai perangkat untuk membaca arah, besaran, dan durasi respons ekspor setelah gejolak tarif terjadi. IRF tersebut diestimasi menggunakan pendekatan *Local Projection* (LP) yang dipopulerkan oleh Jordà,⁵⁵ yaitu dengan mengestimasi respons pada setiap horizon waktu melalui serangkaian regresi terpisah, alih-alih menurunkannya dari sistem VAR yang lebih restriktif dan bergantung kepada spesifikasi model tertentu. Model dalam studi ini kemudian dibangun berdasarkan pendekatan tersebut dan telah dimodifikasi menyesuaikan apa yang dibangun oleh Furceri et al (2019).⁵⁶

$$\Delta \ln(\text{Export}_{c,t+h}) = \alpha + \beta_h \Delta t_t + \gamma_h (\text{Indo}_c \times \Delta t_t) + \theta Z_t + \rho_c + \mu_t + \varepsilon_{c,t+h}$$

Nilai total ekspor telah ditransformasi menjadi *delta* logaritma natural untuk memenuhi stasioneritas menjadi variabel dependen dengan subskrip h mewakili negara pengekspor (Tiongkok dan Indonesia) ke Amerika Serikat. Berangkat dari asumsi bahwa variabel dependen dinyatakan dalam bentuk pertumbuhan (*delta*), maka koefisien pada setiap horizon h dalam IRF ini harus dimaknai sebagai dampak akumulatif terhadap level ekspor, bukan sekadar fluktuasi tunggal pada

periode tersebut. Dengan demikian, model yang dihasilkan menggambarkan lintasan dinamis dari total respons ekspor sebagai akibat dari guncangan tarif.

Sementara itu, $Indo_c$ adalah perubahan tarif AS terhadap Tiongkok pada bulan I menggunakan *weighted average tariff rate* atau tarif rata-rata tertimbang. Secara formal, koefisien pada $\Delta\tau$ merepresentasikan respons ekspor negara Tiongkok. Sedangkan, jumlah koefisien $\Delta\tau$ dan interaksinya dengan $Indo_c$ sebagai *dummy* yang bernilai satu untuk Indonesia dan nol untuk Tiongkok, mengukur respons Indonesia akibat tarif Amerika Serikat ke Tiongkok. Dalam hal ini, variabel *dummy* ini bukan untuk menyatakan *time treatment* seperti membandingkan sebelum dan sesudah tarif terjadi. Selanjutnya, koefisien ρ_c mengukur respons Tiongkok pada horizon h , sedangkan ρ_c menangkap perbedaan respons Indonesia relatif terhadap Tiongkok pada horizon yang sama. Kemudian, variabel ρ_c dan z_t masing-masing mencerminkan efek tetap unit dan efek tetap waktu.

Guna mengisolasi dampak murni dari guncangan tarif secara *ceteris paribus*, model ini turut menyertakan z_t sebagai vektor variabel kontrol. Variabel ini mencakup nilai tukar nominal, Indeks Harga Konsumen (IHK) eksportir dan importir, serta Baltic Dry Index (BDI) untuk mengontrol fluktuasi biaya perdagangan internasional yang bersumber dari dinamika logistik global.

Pemilihan variabel nilai tukar nominal didasarkan atas perannya sebagai salah satu mekanisme transmisi utama untuk guncangan tarif karena kebijakan tarif berpotensi memicu penyesuaian nilai tukar melalui perubahan arus perdagangan dan ekspektasi pasar, sebagaimana juga dijadikan sebagai acuan dalam studi Furceri et al. Variabel IHK digunakan sebagai proksi harga domestik untuk menangkap dinamika harga relatif dan kondisi permintaan agregat, sebagaimana digunakan dalam studi Nan Li dan Sergii Meleshchuk mengingat ekspor sangat sensitif terhadap perubahan daya saing harga.⁵⁷ Kedua variabel tersebut secara bersama-sama merepresentasikan dinamika nilai tukar riil secara implisit. Dengan mengontrol keduanya, estimasi dampak tarif dapat dipisahkan dari pengaruh fluktuasi inflasi domestik maupun depresiasi atau apresiasi nilai tukar nominal.

Selanjutnya, pemilihan variabel BDI mengacu kepada studi Xingong Ding dan Yong Jae Choi yang menunjukkan bahwa biaya perdagangan, yang diprosikan melalui biaya logistik, merupakan salah satu determinan penting dalam menjelaskan dinamika rantai pasok global dan memiliki hubungan timbal balik (endogen) dengan volume perdagangan.⁵⁸ Dengan menjadikannya sebagai variabel kontrol, BDI mampu mengisolasi distorsi tarif terhadap fluktuasi biaya logistik global. Selain itu, penyertaan BDI dimaksudkan untuk meminimalisir potensi *loop* endogenitas, yaitu ketika tarif memengaruhi biaya pengiriman, biaya pengiriman memengaruhi ekspor, dan pada saat yang sama volume ekspor turut menentukan tingkat biaya pengiriman di pasar global. Dengan mengontrol faktor ini, estimasi menjadi lebih *robust* terhadap potensi simultanitas antara volume perdagangan dan harga pengiriman.

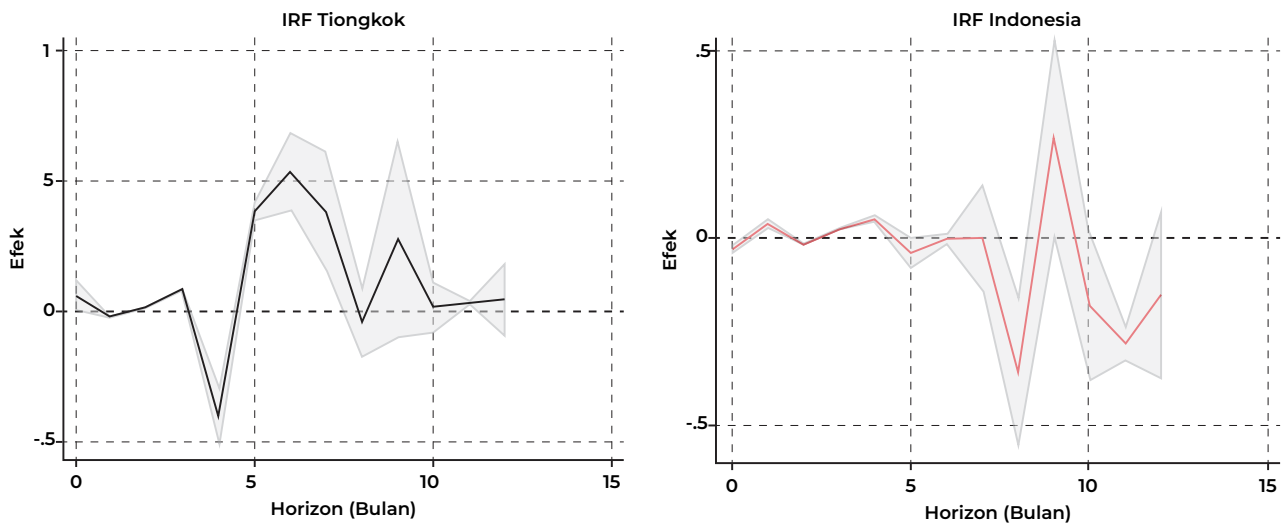
Adapun data penelitian dihimpun dari berbagai sumber seperti Trade Map untuk nilai ekspor; Peterson Institute for International Economics (PIIE) untuk tarif rata-rata tertimbang; CEIC Data untuk nilai tukar; serta Bloomberg Terminal untuk IHK negara eksportir dan importir serta Baltic Dry Index. Penjelasan lebih lanjut bagian ini dapat dilihat di bagian Lampiran 4.

Atas dasar data yang digunakan berbentuk panel, LP diadopsi dalam bentuk *Panel Local Projection* (PLP) berbasis panel bulanan dengan tahun analisis dimulai dari Januari 2015 hingga September 2025. Pendekatan ini relevan untuk studi ini karena panel memungkinkan kontrol atas heterogenitas yang tidak teramati melalui *fixed effects*, sekaligus memberi fleksibilitas dalam bentuk respons sehingga IRF tidak dipaksakan mengikuti pola tertentu. Sejalan dengan itu, merujuk kepada IMF bahwa kerangka *Local Projection* (LP) cukup fleksibel untuk mengakomodasi struktur data panel, sehingga relatif tidak rentan terhadap kesalahan spesifikasi model.⁵⁹ Fleksibilitas ini penting dalam konteks perang dagang, di mana distorsi kebijakan dapat bersifat tidak simetris dan responsnya dapat muncul bertahap akibat faktor seperti penyesuaian kontrak, perubahan ekspektasi, dan restrukturisasi rantai pasok.

Dengan demikian, kombinasi panel data, PLP, dan IRF dalam penelitian ini merupakan pilihan metodologis yang konsisten dengan tujuan analisis untuk memetakan dinamika respons ekspor terhadap gejolak tarif secara bertahap, sekaligus menilai apakah dampaknya bersifat sementara atau persisten dalam horizon tertentu. Dalam hal ini, kajian akan mengulas dampak langsung terhadap Tiongkok sebagai pihak yang dikenakan tarif dan dampak tidak langsung terhadap Indonesia melalui adanya potensi pengalihan perdagangan.

Respons ekspor Tiongkok sebagaimana ditunjukkan oleh Bagan 22 memperlihatkan polayang dinamis. Pada beberapa bulan pertama setelah adanya guncangan tarif, penurunan ekspor belum terjadi secara signifikan. Adapun hal tersebut dapat dipahami sebagai fase penyesuaian awal pelaku perdagangan dan kontrak pengiriman yang cenderung berfluktuasi. Namun memasuki bulan keempat, ekspor Tiongkok ke Amerika Serikat mengalami kontraksi yang tajam, di mana penurunannya menggambarkan efektivitas tarif dalam menekan barang-barang Tiongkok yang masuk ke pasar AS. Meskipun demikian, efek negatif tersebut hanya bersifat sesaat. Memasuki horizon sekitar bulan kelima hingga ketujuh, temuan menunjukkan adanya proses pemulihan secara gradual. Pada bagian akhir horizon, laju pertumbuhan mulai melambat menuju titik nol. Pola semacam ini tidak berarti bahwa tarif berdampak menguntungkan bagi Tiongkok. Sebaliknya, lebih tepat dipahami sebagai cerminan kecenderungan pasar yang menyeimbangkan diri kembali melalui penyesuaian rantai pasok dan pengalihan jalur ekspor melalui negara ketiga. Dengan kata lain, respons Tiongkok menunjukkan bahwa guncangan tarif memang mengganggu ekspor dalam jangka pendek, namun efeknya perlahan memudar seiring adanya adaptasi oleh pasar.

Bagan 22. Impulse Response Function (IRF) Tarif AS-Tiongkok terhadap Nilai Delta Logaritma Natural Ekspor Tiongkok (Kiri) dan Indonesia (Kanan) ke Amerika Serikat selama 12 Periode ke Depan



Sumber: Diolah Penulis

Respons ekspor Indonesia memperlihatkan dinamika yang lebih kompleks. Dalam enam bulan pertama, terdapat respons positif yang kecil terhadap guncangan tarif Amerika Serikat terhadap Tiongkok, dengan laju pertumbuhan positif pada bulan pertama, ketiga, dan keempat. Efek awal yang positif ini bukan indikasi pengalihan yang mapan, tetapi lebih mencerminkan ekspektasi jangka pendek importir Amerika Serikat atas potensi substitusi barang dari negara lain setelah tarif dikenakan kepada Tiongkok. Oleh sebab itu, respons positif awal ini dapat dipahami sebagai refleksi dari antisipasi pasar bahwa Indonesia mungkin menjadi salah satu alternatif sumber pasokan. Namun pola tersebut hanya bersifat sementara. Setelah memasuki pertengahan horizon, sekitar bulan kedelapan, respons ekspor Indonesia berubah menjadi negatif dan semakin dalam. Respons negatif ini menunjukkan bahwa substitusi barang dari Tiongkok ke Indonesia tidak terjadi secara substansial. Kemudian, mengalami laju pertumbuhan yang positif kembali pada bulan kesembilan, lalu kembali mengalami laju pertumbuhan yang negatif. Berbeda dengan Tiongkok yang cenderung mengalami laju pertumbuhan positif pada akhir horizon, hasil estimasi Indonesia menunjukkan tidak mampunya Indonesia memiliki pertumbuhan ekspor yang persisten di pasar Amerika Serikat. Hal ini tidak terlepas dari berbagai faktor kemungkinan seperti sifat barang yang terpengaruh serta kekuatan pasar produsen Tiongkok yang berfokus kepada barang setengah jadi olahan yang secara teknologi lebih canggih dan memiliki elastisitas substitusi lebih rendah.⁶⁰

Sebagai catatan kecil, hasil dari inferensial ini tidak sepenuhnya merefleksikan dinamika yang terjadi karena beberapa batasan seperti (1) tidak memasukkan faktor-faktor dinamis seperti perjanjian dagang (*trade deal*) dan perubahan geopolitik yang tentunya dapat memengaruhi kinerja ekspor Indonesia ke AS ke depannya, serta (2) data yang digunakan bervariasi dari tahun 2015 hingga 2025 sehingga hasil inferensial lebih tergeneralisir dengan periode-periode perubahan

tarif sebelumnya. Secara keseluruhan, analisis inferensial ini dilakukan untuk memperkaya tulisan sebagai fondasi untuk melihat efek murni dari perubahan tarif pada suatu periode dan dampaknya satu tahun ke depan, *ceteris paribus*, sehingga dapat dilakukan formulasi keputusan yang dapat diambil. Meskipun tidak merefleksikan secara riil sepenuhnya, sebagian dari analisis cukup merefleksikan kondisi yang terjadi

Implikasi ke Depan

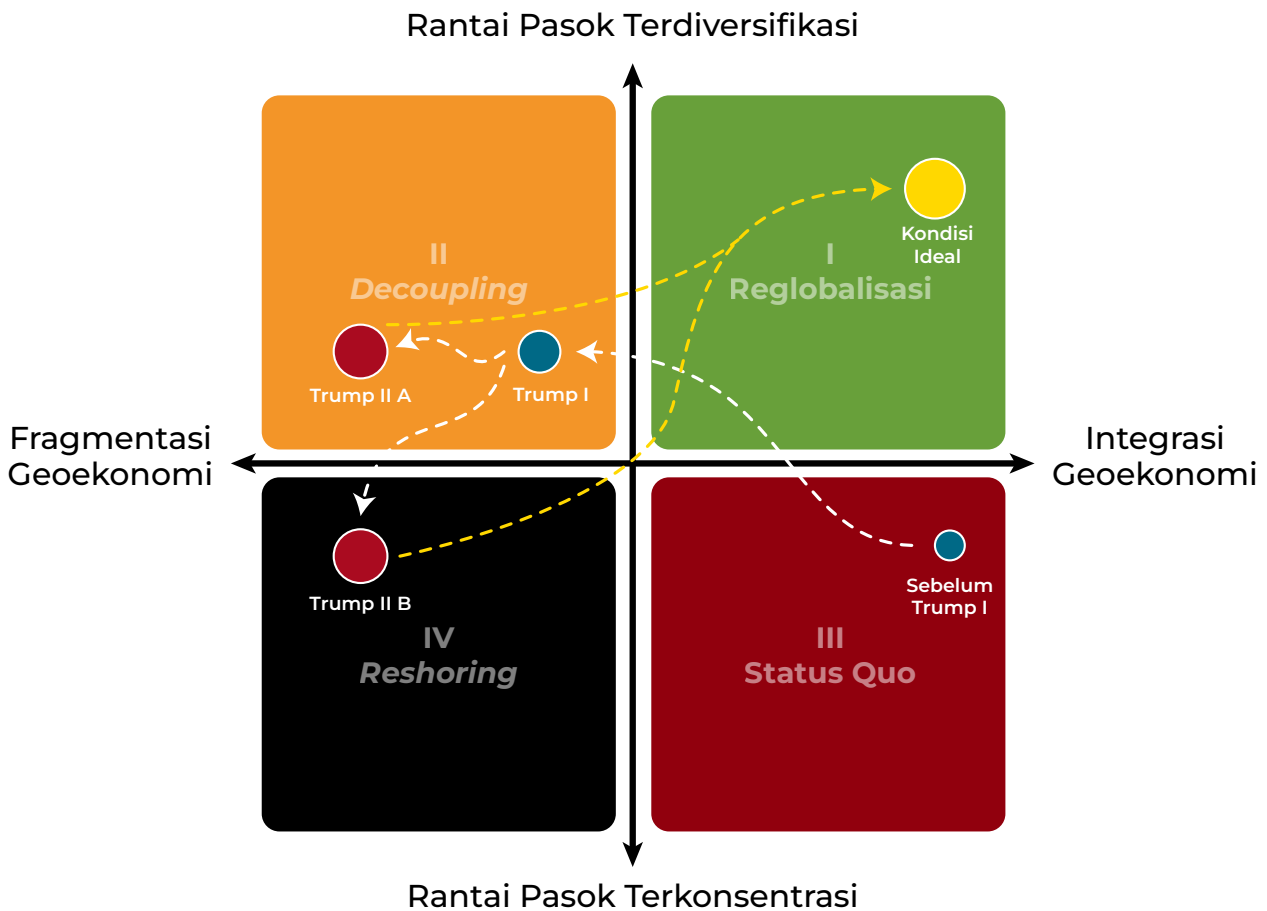
Sebagai transisi menuju pembahasan yang lebih strategis, bagian ini berusaha memahami dinamika yang ada secara lebih sistematis melalui penyusunan skenario (*scenario building*). Skenario ini akan memerhatikan dua variabel determinan, yakni kondisi perdagangan dunia sebagai sumbu X dan tingkat derajat konsentrasi rantai pasok sebagai sumbu Y. Sumbu X menggambarkan dinamika iklim perdagangan dunia yang secara manuver didominasi oleh negara berkekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Pemilihan sumbu X didasarkan atas peringatan IMF bahwa dunia saat ini berada pada era pembalikan integrasi ekonomi yang populer disebut sebagai fragmentasi geoekonomi, yang diproyeksi akan teramplifikasi secara signifikan jika terjadi *decoupling* teknologi di antara blok-blok tertentu.⁶¹

Fenomena tersebut tidak hanya mendisrupsi pertumbuhan global, tetapi juga memberikan beban risiko lebih besar bagi negara berkembang dan negara berpenghasilan rendah akibat hilangnya limpahan pengetahuan (*knowledge spillovers*) yang selama ini diperoleh melalui integrasi global.⁶² Berangkat dari risiko tersebut, krusial untuk menjadikan respons terhadap perkembangan sumbu X sebagai basis dalam sumbu Y. Dalam kajian ini, sumbu Y dipilih untuk mengukur ambang batas resiliensi negara dunia kedua dan ketiga dalam menghadapi dampak luapan (*spillover effects*) dari fragmentasi geoekonomi. Justifikasi pemilihan sumbu ini diperkuat oleh analisis UNCTAD yang menyatakan bahwa evolusi GVC kontemporer telah mempersempit ruang pengambilan kebijakan, terutama bagi negara berkembang yang secara simultan tengah mengalami regresi struktural seperti deindustrialisasi dini dan peningkatan ketergantungan pada komoditas.⁶³ Pada akhirnya, pembangunan skenario berbasis interaksi kedua sumbu akan memetakan kemampuan negara-negara di dunia dalam menavigasi posisi tawar di tengah pergeseran lanskap ekonomi internasional.

Interaksi kedua sumbu di Bagan 23 membentuk kemungkinan empat skenario yang merepresentasikan dinamika perdagangan internasional, arah evolusi rantai pasok, serta ruang manuver bagi negara berkembang seperti Indonesia. Skenario pertama merepresentasikan kondisi ideal, yakni ketika integrasi geoekonomi disertai dengan rantai pasok yang terdiversifikasi. Dalam tatanan ini, isu-isu seperti keamanan ekonomi dan faktor geopolitik tidak memecah dunia ke dalam blok-blok tertentu yang secara berkepanjangan memengaruhi stabilitas perdagangan internasional. Sebaliknya, memicu proses reglobalisasi sebagai penataan ulang ekonomi dunia yang memperluas integrasi ke lebih banyak negara dan mencakup spektrum isu yang lebih luas.⁶⁴ Melalui reglobalisasi,

sistem produksi global tumbuh menjadi lebih resilien dan terdistribusi secara lebih merata. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Franklin D. Roosevelt menjelang akhir perang dunia kedua bahwa kesuksesan dalam membangun dunia yang damai tidak akan tercapai kecuali didasari oleh dunia yang sehat secara ekonomi. Dalam skenario ini, rantai pasok tidak hanya terpaku kepada pencarian efisiensi biaya terendah, tetapi juga semakin adaptif dan responsif terhadap pola perdagangan yang terus berevolusi. Pada kondisi inilah, rantai pasok secara mandiri mampu melakukan rekonfigurasi saat terjadi disrupsi, dengan mampu memberikan ruang bagi negara dunia kedua dan ketiga untuk mengintegrasikan jaringan industri mereka ke dalam ekosistem global.

Bagan 23. Skenario Iklim Perdagangan Dunia di Tengah Orde Ekonomi Global Baru



Akan tetapi, perkembangan kondisi dunia selama beberapa periode terakhir membawa kajian kepada penilaian yang jauh dari skenario ideal tersebut. Pada kondisi awal (*initial condition*) sebelum tarif, dunia berada di tingkat fragmentasi yang rendah dengan arus perdagangan berpegang norma efisiensi biaya atau *comparative advantage*. Hal itu digambarkan oleh kuadran ketiga sebagai representasi skenario *status quo*. Akan tetapi, semakin terlihat intervensi Amerika Serikat dalam mendikte arah geoekonomi pada periode pertama Donald Trump, di mana fragmentasi yang ada memperjelas manuver *decoupling* dan menggeser

posisi dunia ke arah kuadran kedua. Meskipun stabilitas global terganggu, diversifikasi rantai pasok saat itu masih cukup terjaga, di mana pelaku usaha tetap mampu melakukan pengalihan basis produksi guna memitigasi dampak tarif. Fenomena ini tercermin secara empiris melalui peningkatan ekspor dan arus investasi di beberapa negara Asia Tenggara seperti Vietnam⁶⁵ dan Thailand.⁶⁶

Namun, memasuki periode perang dagang kedua, eskalasi ketidakpastian melemahkan fleksibilitas tersebut. Kembalinya multipolaritas dunia di tingkat yang lebih intens, terlihat dari peningkatan intervensi dan restriksi perdagangan serta penurunan keterbukaan perdagangan dunia. Situasi diperburuk oleh kenaikan rata-rata tarif AS yang mencapai titik tertinggi sejak era perang dunia kedua. Sentimen proteksionisme tersebut berjalan beriringan dengan melemahnya peran lembaga multilateral. Hal ini terlihat nyata dari langkah AS yang menarik diri, atau setidaknya mengurangi komitmen, terhadap organisasi dan kesepakatan internasional seperti WTO, UNCTAD, hingga *Paris Agreement*. Menjadi sebuah ironi bahwa WTO sebagai tuas yang menjaga atmosfer perdagangan dunia bahkan mengalami degradasi peran dan berpotensi *stalemate* seiring buntutnya penyelesaian sengketa usai blokade *Appellate Body* oleh AS.

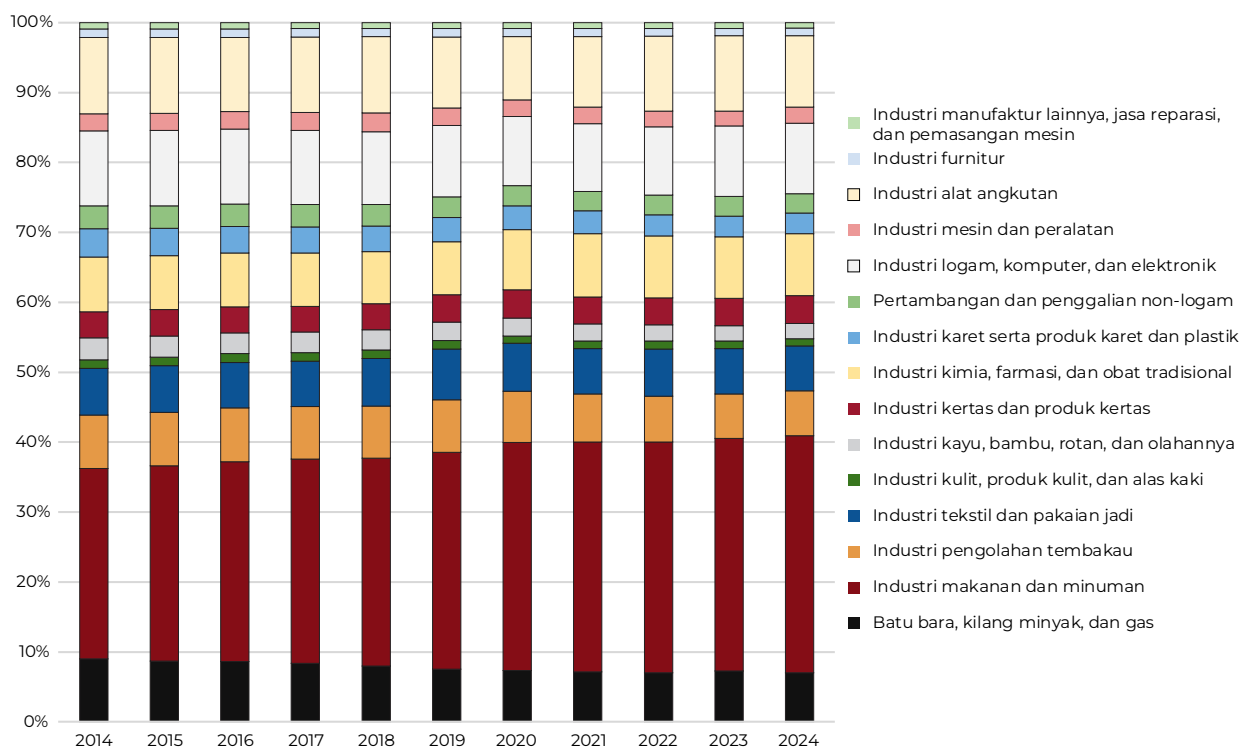
Dengan semua kondisi itu, dinamika perdagangan dunia semakin bergerak menuju fragmentasi ekstrem. Meski demikian, hingga saat ini, adaptasi global yang signifikan belum terlihat karena tarif unilateral saat ini masih dalam tahap negosiasi. Oleh karena itu, kajian memetakan dua kemungkinan skenario yang dapat terjadi pada perang dagang kedua ini. Pertama, dunia tetap terjebak dalam pola *decoupling* seperti perang dagang sebelumnya. Struktur rantai pasok tidak banyak berubah dari era perang dagang pertama, hanya intensitas disintegrasi yang jauh lebih tajam. Dalam skenario ini (Trump II A), fragmentasi geoekonomi tetap berlangsung, namun rantai pasok global masih cukup terdiversifikasi sehingga negara-negara berkembang seperti Indonesia masih dapat memperoleh limpahan pengalihan perdagangan sebagaimana terjadi pada era Trump pertama.

Akan tetapi, terdapat kemungkinan lain bahwa retaliasi dan deglobalisasi semakin memperkuat ancaman 'kebuntuan ekonomi' sebagaimana terlihat di Kuadran IV. Situasi ini kemudian mengunci para pelaku pasar dalam ekspektasi negatif dan sikap *wait-and-see*. Akibatnya, pengalihan perdagangan tidak lagi menjadi *spillover* positif. Ia mandek sebagai potensi yang gagal terartikulasikan bagi negara dunia kedua dan ketiga. Bahkan dalam skenario yang lebih ekstrem, ketidakpastian mampu mendorong kemungkinan kembalinya aktivitas produksi serta arus modal ke negara asal (*reshoring*), dalam hal ini Amerika Serikat, untuk memperkuat basis industri domestiknya di tengah rivalitas geoekonomi yang kian intens. Dalam skenario ini (Trump II B), negara berkembang tidak hanya kehilangan peluang pengalihan perdagangan, tetapi juga berhadapan dengan ancaman marginalisasi dari GVC yang selama ini menjadi mekanisme peningkatan kapasitas industri (dari aktivitas bernilai tambah rendah menuju sektor berteknologi tinggi) itu sendiri.

Untuk setiap konfigurasi yang digambarkan melalui skenario di atas, implikasinya terhadap masing-masing negara tidak seragam. Di satu sisi, peningkatan fragmentasi perdagangan global memperbesar tekanan bagi perusahaan multinasional untuk mengalihkan produksi ke negara ketiga sebagai respons terhadap restriksi kebijakan dan risiko geopolitik. Namun, tekanan relokasi tersebut tidak secara otomatis diterjemahkan menjadi manfaat ekonomi bagi negara lain, baik dalam bentuk kenaikan perdagangan dan investasi. Hasil akhir semuanya akan tetap dilandaskan dari kemampuan domestik untuk menyerap pengalihan tersebut secara produktif, baik dari kesiapan industri, daya saing struktural, serta harmonisasi kebijakan serta kelembagaan.

Atas dasar itu, arah kebijakan Indonesia perlu bergeser dari sekadar merespons disrupsi eksternal menuju penguatan fondasi industri dan institusi domestik, agar Indonesia tidak hanya berperan sebagai alternatif yang lebih “murah”, tetapi sebagai aktor strategis dalam rekonfigurasi GVC. Oleh karena itu, sebagai langkah awal, pemahaman atas profil dan dinamika industri nasional menjadi titik awal yang penting dalam melihat seberapa jauh peluang Indonesia ke depan dengan mempertimbangkan kondisi saat ini.

Bagan 24. Profil Industri Indonesia Berdasarkan Output, 2014-2024⁶⁷



Sumber: CEIC Database (diolah)

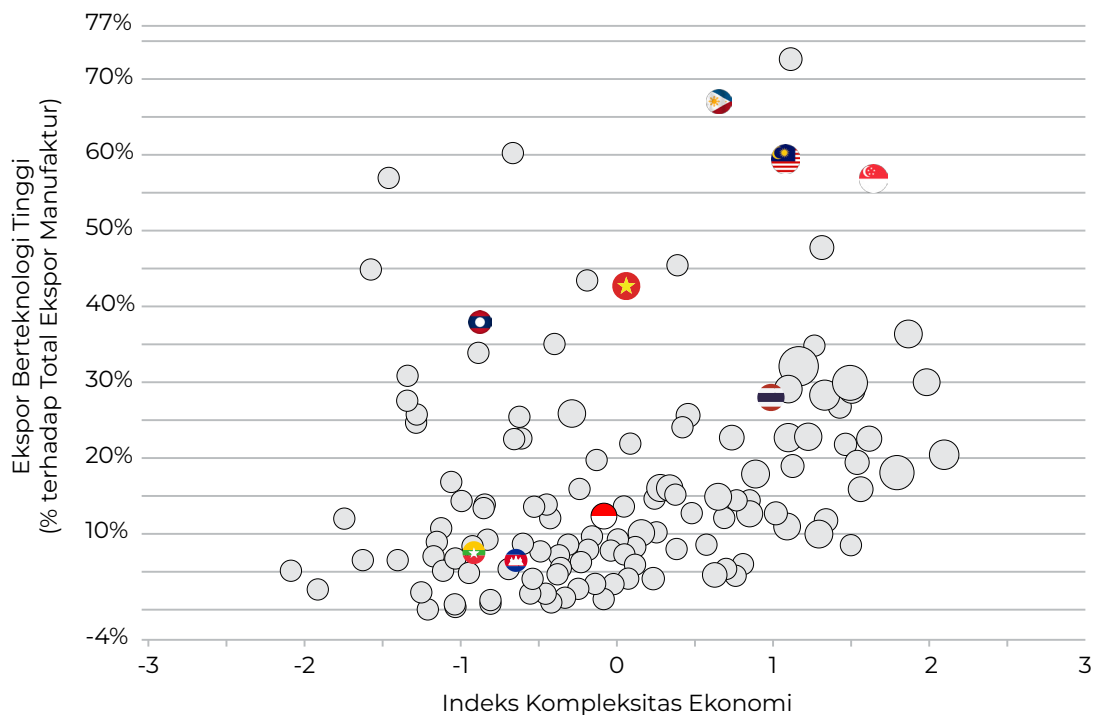
Penelaahan struktur dan dinamika produksi industri nasional selama periode 2014-2024 menunjukkan bahwa pertumbuhan output berlangsung secara gradual tanpa perubahan struktur yang signifikan. Melihat Bagan 24, fokus industri Indonesia masih didominasi oleh industri manufaktur sederhana seperti industri kertas dan produk kertas yang memberikan kontribusi 34 persen terhadap total output sektoral. Akan tetapi, perlu diakui bahwa peta industri Indonesia secara

fundamental memiliki diversifikasi ke sektor-sektor menengah seperti industri kimia dan farmasi, industri logam, serta industri alat angkut

Meski demikian, dalam konteks efek perang dagang, data tersebut tidak menunjukkan adanya *structural break* yang terjadi bersamaan dengan era Trump 1.0 maupun eskalasi lanjutan pada era Trump 2.0. Peningkatan *output* bersifat relatif merata dan mengikuti siklus bisnis konvensional. Pola itu secara tidak langsung mengindikasikan bahwa guncangan tarif global tidak atau belum terinternalisasi sebagai katalis transformasi industri domestik yang bersifat masif.

Kondisi tersebut menjadi cerminan atas tantangan struktural yang selama ini dihadapi. Sebagaimana Bagan 25 memetakan korelasi antara Indeks Kompleksitas Ekonomi (*Economic Complexity Index*) dan pangsa ekspor teknologi tinggi, posisi Indonesia soal variabel itu berada dalam posisi yang mengkhawatirkan. Nilai kompleksitas ekonomi Indonesia mendekati nol dengan pangsa ekspor teknologi tinggi yang hanya berada di kisaran 10 persen. Hal ini membuktikan kegagalan penetrasi ke segmen bernilai tambah tinggi, sebuah tantangan sistemik yang memang telah bertahan lama sejak era Presiden Soeharto.⁶⁸ Secara empiris, stagnasi ini terlihat dari spesialisasi industri Indonesia dalam memenuhi permintaan pasar Amerika Serikat yang masih terkonsentrasi kepada produk padat karya dengan nilai pasar relatif rendah. Akibatnya, produk Indonesia menjadi sangat mudah disubstitusi oleh negara lain. Realitas ini menjadi salah satu alasan kekhawatiran pemerintah saat menyikapi Liberation Day yang berdampak langsung ke Indonesia.

Bagan 25. Perbandingan Indeks Kompleksitas Ekonomi (ECI)⁶⁹ dan Pangsa Ekspor Teknologi Tinggi di ASEAN, 2023⁷⁰

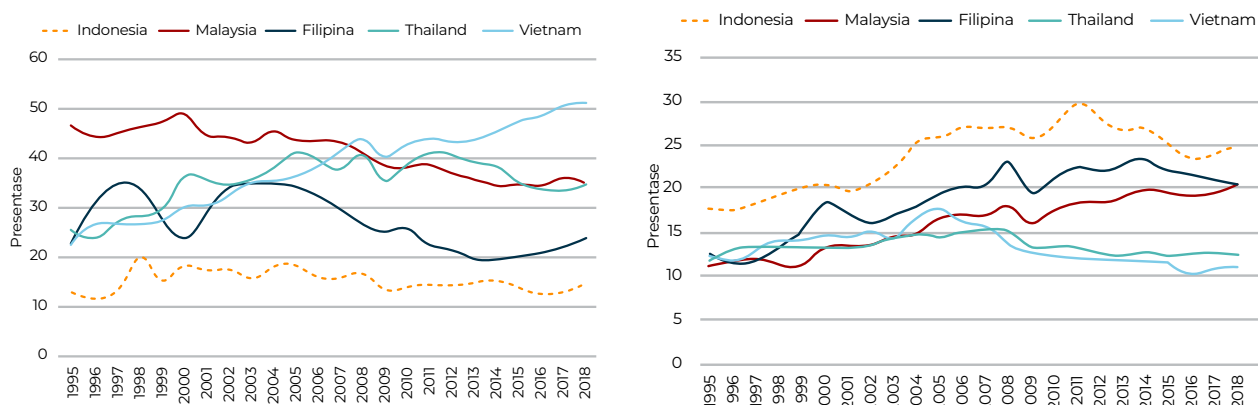


Sumber: The Observatory of Economic Complexity (diolah)

Di sisi lain, isu soal kompleksitas tersebut sangat kontras jika dibandingkan dengan beberapa negara Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina. Negara-negara ini memiliki tingkat kompleksitas ekonomi yang jauh lebih unggul dibandingkan Indonesia, dengan pangsa ekspor teknologi tinggi di atas 50 persen. Di tingkat perusahaan, dengan menjaga kompleksitas yang mumpuni, mereka juga dinilai memiliki peluang besar untuk mempertahankan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) yang berkelanjutan.⁷¹ Ekosistem pemasok yang sudah terbangun secara spesifik, investasi modal manusia yang mendalam, serta pengembangan litbang dan pembangunan teknologi mutakhir menjadi faktor-faktor yang menjadi daya tawar mereka soal daya saing, yang mana hal-hal tersebut juga sulit direplikasi dalam waktu singkat.

Data *Trade in Value Added* (TiVA) yang dihimpun dari Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) memperkuat simpulan di atas. Sebagai gambaran, tingkat partisipasi suatu negara dalam GVC dapat dilihat dari dua indikator utama, yakni partisipasi ke depan (*forward participation*) dan partisipasi ke belakang (*backward participation*). Pada dasarnya, partisipasi ke depan menggambarkan besaran nilai tambah domestik yang diekspor dan digunakan oleh negara tujuan untuk membuat produk ekspornya. Sementara, partisipasi ke belakang adalah kondisi saat suatu negara menggunakan impor dari negara lain untuk produksi dan kemudian mengekspor kembali. Sebagaimana terlihat di Bagan 26, perbandingan di antara negara ASEAN menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tingkat partisipasi ke depan paling tinggi. Maknanya, banyak negara mengimpor bahan baku dari Indonesia untuk produksi mereka, sejalan dengan keunggulan komparatif dalam negeri menghasilkan produk ekstraksi sumber daya alam. Sebaliknya, partisipasi ke belakang Indonesia menjadi yang paling kecil, dengan pertumbuhan stagnan dalam beberapa dekade terakhir.

Bagan 26. Komparasi *Forward Participation* (Kiri) dan *Backward Participation* (Kanan) Negara ASEAN



Sumber: Organisation for Economic Cooperation and Development dalam Kajian Konektivitas LAB 45

Secara umum, hambatan-hambatan struktural di atas menjelaskan mengapa reposisi Indonesia di tengah pasar yang semakin disruptif ini masih sulit dijelaskan. Dibanding refleksi semata atas efek perang dagang sebagai faktor eksternal di

luar kendali, tulisan ini berupaya melihat kematangan dan kesiapan industri sebagai prasyarat krusial yang harus diupayakan secara dini. Kombinasi antara kualitas kebijakan, kapasitas industri, serta tingkat kompleksitas produksi akan menentukan derajat resiliensi ekonomi nasional dalam merespons berbagai skenario pergeseran tatanan ekonomi dunia. Untuk memetakan potensi dampak tersebut secara lebih spesifik, Tabel 2 di bawah ini menyajikan matriks skenario yang membedakan hasil akhir kebijakan tarif berdasarkan tingkat kesiapan industri domestik.

Berdasarkan tabel interaksi antara kesiapan industri dan dinamika rezim proteksionisme perdagangan, asesmen saat ini menempatkan Indonesia di posisi kesiapan menengah yang rawan terhadap skenario tarif unilateral. Tekanan tarif terhadap Tiongkok memang menciptakan insentif awal untuk pengalihan produksi. Namun, pemanfaatan peluang tersebut bersifat sementara karena segera tereduksi oleh tingginya biaya ekspor sebagaimana Indonesia masih sangat bergantung oleh barang input impor untuk setiap proses produksinya. Dengan kesiapan industri moderat, pengalihan atau diversifikasi pada akhirnya berpotensi oportunistik dan terbatas hanya kepada aktivitas perakitan atau manufaktur ringan sebagai strategi *tariff bypass* semata.

Tabel 2. Skenario Dampak Perang Dagang berbasis Kesiapan Industri terhadap Negara

Kategori	Skenario Tarif Dikenakan Bilateral dan Selektif	Skenario Tarif Dikenakan Unilateral dan Menyeluruh
Kesiapan industri tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengalihan perdagangan berpotensi terjadi di sektor yang telah memiliki basis industri yang cukup kuat dan kapasitas ekspor memadai • FDI yang masuk diterjemahkan ke peningkatan nilai tambah industri dan optimalisasi memanfaatkan pengalihan pasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengalihan perdagangan terbatas di sektor-sektor tertentu karena hambatan biaya dan ketidakpastian meningkat • Meski industri domestik relatif siap, pengalihan perdagangan dan investasi tidak otomatis meningkat karena <i>compliance rules</i> yang ketat (seperti <i>rules of origin</i> sebagai aturan global) dan risiko lokasi produksi
Kesiapan industri menengah	<ul style="list-style-type: none"> • Impor barang antara (<i>intermediate</i>) dari Tiongkok meningkat untuk diolah menjadi barang jadi ekspor bernilai tambah • Dalam konteks pengalihan perdagangan kemungkinan menjadi tempat perakitan (<i>assembly</i>) maupun produksi manufaktur skala ringan 	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya ekspor melonjak karena pengenaan tarif lebih tinggi, terlebih bagi sektoral dengan ketergantungan tinggi akan input impor • Relokasi yang masuk bersifat jangka pendek (sekadar <i>bypass</i> tarif) dengan risiko terjebak kepada <i>assembly trap</i> • Diversifikasi bersaing dengan negara-negara dunia ketiga yang memiliki basis industri dan logistik efisien

Kesiapan industri rendah	Terjadi distorsi sesaat yang menciptakan pengalihan perdagangan temporer. Kenaikan ekspor hanya berbasis sumber daya dan output sederhana	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih sulit menarik manfaat dari pengalihan perdagangan, di mana tarif tinggi tidak menciptakan insentif pengalihan yang cukup ke negara dengan kesiapan industri rendah • Kecenderungan industri berbasis sumber daya dan tenaga kerja
---------------------------------	---	--

Pemanfaatan peluang tersebut juga menjadi semakin semu apabila melihat masalah struktural industri Indonesia secara lebih luas. Fenomena *missing middle* adalah hal yang dihadapi Indonesia sekarang. Di satu sisi, struktur bisnis Indonesia didominasi oleh unit mikro dan kecil yang secara karakteristik memiliki kontribusi nilai tambah yang rendah. Menyadur data dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN), total Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mencapai 99,92 persen dari keseluruhan unit usaha pada tahun 2021.⁷² Skala usaha yang terbatas ini kemudian menghambat efisiensi produksi, sehingga menjelaskan mengapa penetrasi pelaku usaha Indonesia di pasar global masih sangat terbatas. Di sisi lain, arus investasi yang masuk ke Indonesia cenderung bersifat padat modal dan lebih terkonsentrasi ke korporasi besar atau konglomerasi.⁷³ Pembangunan smelter dan industri petrokimia menjadi contoh nyata yang menjelaskan situasi tersebut.

Di antara kedua ekstrem tersebut, jumlah perusahaan manufaktur skala menengah sangat sedikit, yakni hanya 0,07 persen besarnya. Berbicara UMK, skala usaha ini selalu mendapat prioritas soal kemudahan perizinan, berbagai skema subsidi, hingga pengecualian pajak (PPH Final 0,5 persen) yang bertujuan untuk perlindungan sosial. Akan tetapi hal berbeda terjadi dalam konteks perluasan skala usaha dari kecil ke menengah. Sejauh ini disinsentif lebih sering timbul, baik dalam bentuk kenaikan biaya kepatuhan (beban pajak efektif yang tentunya lebih besar daripada saat perusahaan berskala kecil), kewajiban memenuhi upah minimum, kewajiban pemberian pesangon, dan persyaratan pelaporan yang jauh lebih rumit). Biaya-biaya ini sering kali meningkat lebih cepat daripada peningkatan produktivitas atau pendapatan, sehingga pengembangan bisnis menjadi kurang menarik secara ekonomi. Akibatnya, banyak bisnis secara bijak memilih untuk tetap kecil dan informal daripada 'naik kelas'.

Padahal, dengan ukuran usaha yang relatif mumpuni untuk menciptakan efisiensi, keberadaan manufaktur kelas menengah dapat menjadi prakondisi untuk menyerap alih teknologi dan menjadi penghubung integrasi industri ke dalam GVC. Hal inilah yang menjelaskan mengapa industri Indonesia tertinggal cukup jauh dalam ekspor produk manufaktur berteknologi tinggi seperti apa yang telah disampaikan di bagian sebelumnya. Situasi semakin sulit tatkala Indonesia juga harus bersaing dengan negara ketiga yang memiliki ekosistem industri, logistik, dan stabilitas kebijakan yang jauh lebih mapan.

Selain kesiapan secara fisik, lemahnya kualitas kelembagaan merupakan hambatan yang krusial untuk dicermati. Ekosistem kelembagaan Indonesia

masih terjebak dalam birokrasi berbelit, regulasi yang tumpah tindih, serta implementasi di lapangan yang belum selaras.⁷⁴ Persoalan ini diperburuk oleh ketiadaan intervensi strategis dalam mengatasi hambatan non-teknis, seperti pungutan liar dan praktik informal lainnya yang telah lama membebani iklim usaha.⁷⁵ Kondisi tersebut menjelaskan mengapa bertransaksi di Indonesia menjadi hal yang dikonsiderasi tinggi biaya. Kelemahan institusional ini pada akhirnya bermuara kepada rendahnya daya tawar Indonesia di kancah global, khususnya dalam hubungan dagang dengan Amerika Serikat. Berbeda dengan Vietnam atau Meksiko yang telah memiliki perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Agreement*), Indonesia tidak memiliki payung hukum perdagangan yang kuat, sehingga posisi ekspor Indonesia tetap rentan terhadap tekanan tarif unilateral. Selain itu, temuan stagnasi ekspor barang jadi Indonesia ke AS di bagian sebelumnya mengonfirmasi bagaimana Indonesia masih belum dipertimbangkan sebagai destinasi produksi baru yang kompetitif.

Di sisi lain, perlu diakui bahwa Indonesia mungkin terlalu 'kecil' untuk menghadapi tekanan dari geoekonomi yang terus bergerak dinamis secara sendirian. Kondisi yang semakin diperparah oleh kebijakan tarif yang menargetkan negara-negara mitra di kawasan Indo-Pasifik juga telah memaksa strategi *China Plus One* menjadi agenda yang semakin mahal dan rumit.⁷⁶ Dalam skenario di mana Tiongkok tetap mengedepankan strategi tersebut, secara implisit dapat memicu persaingan internal di dalamnya, yang dalam hal ini adalah Asia Tenggara sebagai domain paling dominan soal strategi tersebut. Di sinilah kerentanan Indonesia terletak. Dengan profil ekspor yang cenderung mirip untuk beberapa komoditas sumber daya alam, Indonesia harus berhadapan langsung dengan negara tetangga yang lebih siap. Belum lagi menyoal ketimpangan Indonesia dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya, dalam hal penciptaan produk berkompleksitas tinggi ataupun efisiensi produksi. Pada akhirnya situasi semakin memperburuk *positioning* ketahanan eksternal Indonesia.

Rekomendasi Kebijakan

Kajian telah menunjukkan bahwa keterbatasan Indonesia dalam memanfaatkan fragmentasi perdagangan global bukan terutama disebabkan oleh faktor eksternal, tetapi oleh kendala struktural dan kelembagaan domestik yang selama ini menjadi hambatan sistemik dalam negeri. Oleh karena itu, respons kebijakan ke depan perlu diarahkan kepada perbaikan kedua aspek tersebut. Tujuannya agar orientasi Indonesia dalam lanskap perdagangan dunia dapat bertransformasi menjadi internalisasi industri ke dalam GVC yang lebih kompleks. Guna mencapai transformasi tersebut, bagian ini merumuskan sejumlah rekomendasi strategis yang menitikberatkan kepada penguatan ekosistem industri menengah, pembenahan birokrasi, serta sinkronisasi standar regulasi domestik melalui akses internasional yang lebih terstruktur.

Pertama, menyoal fenomena *missing middle*, prioritas kebijakan industri dalam negeri perlu bergeser dari perlindungan unit usaha (yang umumnya berskala mikro dan kecil/UMK) menuju fasilitasi yang mulus bagi perusahaan untuk naik kelastanpa kehilangan dukungan fiskal secara mendadak. Di satu sisi penyesuaian ambang batas seiring perluasan skala usaha seperti regulasi, sistem perpajakan, dan biaya kepatuhan memang diperlukan karena usaha menengah memiliki produktivitas dan daya tahan yang jauh lebih unggul dibandingkan UMK. Selain itu, perusahaan menengah memiliki kapasitas manajerial yang lebih siap untuk menyerap teknologi dan standarisasi ekspor, yang selama ini telah menjadi salah satu fokus Tiongkok untuk mengembangkan GVC-nya.⁷⁷

Namun, penyesuaian tersebut seyogianya dilakukan secara bertahap seiring dengan pertumbuhan skala bisnis. Terdapat pemikiran sederhana. Apabila UMK yang memiliki keterbatasan modal bisa diberikan kemudahan, maka perusahaan menengah yang memang sudah menargetkan pasar ekspor seharusnya dapat diberikan insentif, paling tidak sementara, sebagai apresiasi keberhasilan perluasan skala produksinya.

Kedua, Indonesia perlu memanfaatkan posisinya sebagai negara perdagangan secara lebih strategis. Mengingat saat ini performa ekspor Indonesia masih bertumpu kepada sektor agrikultur dan ekstraktif seperti perkebunan dan pertambangan, diperlukan upaya yang lebih terarah untuk merevitalisasi sektor manufaktur yang selama ini mengalami degradasi gradual. Strategi manufaktur tersebut dapat berlandaskan kepada hilirisasi komoditas agrikultur dan ekstraktif guna memastikan terciptanya nilai tambah di dalam negeri.

Selain mengintegrasikan kedua sektor tersebut, secara bertahap penguatan basis produksi dalam negeri perlu difokuskan kepada lokalisasi bahan baku dan komponen penting manufaktur. Langkah ini tidak hanya sekadar upaya substitusi impor, tetapi juga menjadi strategi untuk mengurangi ketergantungan akan input impor yang selama ini menjadi titik lemah dalam struktur industri nasional. Selanjutnya, peningkatan daya saing industri dapat diakselerasi melalui penguatan keterampilan tenaga kerja (*upskilling*) untuk memaksimalkan

penggunaan barang modal mampu menghasilkan komoditas dengan kompleksitas yang lebih tinggi.

Dalam menjawab permasalahan struktural yang selama ini menjangkit performa ekonomi nasional, diperlukan reformasi menyeluruh terhadap arsitektur regulasi dan kelembagaan. Inilah yang menjadi poin ketiga. Perbaikan perlu difokuskan untuk menghadirkan penyederhanaan dan konsistensi kebijakan industri, supremasi hukum, serta efektivitas birokrasi guna mereduksi biaya non-pasar yang selama ini menjadi pertimbangan berinvestasi di Indonesia. Langkah strategis ini menjadi prasyarat mutlak untuk mendorong efisiensi ekonomi, yang selama ini masih belum optimal, sebagaimana angka *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) Indonesia masih sangat tinggi.

Reformasi tersebut tidak dimaksudkan untuk hanya bergerak di ranah domestik, tetapi juga harus memanfaatkan akses OECD sebagai jangkar eksternal untuk mendisiplinkan perubahan.⁷⁸ Akses ini mewajibkan negara berkembang seperti Indonesia untuk mengikuti, bahkan mempercepat, serangkaian standarisasi negara maju, perbaikan kelembagaan yang lebih transparan dan anti-korupsi, serta kebijakan yang menjunjung keterbukaan ekonomi.⁷⁹ Sebagai penyeimbang, keterlibatan Indonesia dalam BRICS perlu tetap dipertahankan dalam koridor yang lebih pragmatis untuk menjaga ruang manuver di tengah rivalitas geopolitik yang meningkat.⁸⁰ Pendekatan ini bertujuan untuk mengamankan akses pasar dan diversifikasi kemitraan ekonomi dengan negara-negara kekuatan ekonomi baru, tanpa harus terikat secara politik kepada blok yang konsensus normatif dan mekanisme institusionalnya masih belum matang.

Keempat, strategi eksternal juga perlahan perlu diarahkan secara taktis untuk memperkuat daya tawar Indonesia di tengah ketidakpastian geoekonomi. Upaya ini dapat ditempuh melalui dua jalur, yakni (1) perlu mentransformasi fenomena pengalihan perdagangan yang bersifat jangka pendek menjadi penciptaan investasi jangka panjang.⁸¹ Pendekatan ini tidak hanya berorientasi kepada akses pasar untuk peningkatan ekspor sesaat, tetapi dapat dikapitalisasi untuk menarik penanaman modal yang mampu memperdalam integrasi industri nasional dengan Amerika Serikat dalam konteks GVC. Selanjutnya, (2) Indonesia perlu mengupayakan institusionalisasi negosiasi dagang melalui kerangka regional ASEAN sebagai upaya menjaga kelangsungan negara berkekuatan menengah layaknya Indonesia. Sebagaimana integrasi dan liberalisasi mampu memoderasi risiko penurunan ekspor riil akibat asimetri kekuatan dalam negosiasi bilateral,⁸² koordinasi secara kolektif menjadi krusial untuk menjaga posisi tawar, baik terkait tarif maupun bukan tarif, akses pasar, ketentuan asal barang (*rules of origin*), maupun praktik perdagangan tidak adil. Pada saat yang sama, ASEAN dapat memobilisasi reformasi kerangka kerja kawasan, merevitalisasi forum multilateral, serta mengejar inisiatif bersama berbasis plurilateral.⁸³

Selain diplomasi ekonomi, hadirnya ASEAN dapat memfasilitasi redistribusi peran dalam rantai produksi yang bersifat komplementer.⁸⁴ Strategi ini memungkinkan terciptanya spesialisasi sektor prioritas yang terkoordinasi, misalnya tekstil di

Vietnam, alas kaki di Indonesia, dan elektronik di Malaysia. Dalam kerangka kerja ini, bila dioptimalkan, ASEAN mampu berperan sebagai alat untuk membatasi efek substitusi intra-regional sehingga ekosistem industri kawasan tetap resilien di tengah guncangan tanpa memicu eksodus yang masif dari Asia Tenggara.

Namun demikian, integrasi regional ini tidak berarti meniadakan fleksibilitas domestik. Kekuatan kolektif ASEAN perlu ditempatkan sebagai pelindung bagi ruang kebijakan nasional masing-masing anggotanya. Dalam konteks ini, meskipun tetap mengedepankan prinsip bebas-aktif (*non-alignment*), diplomasi ekonomi Indonesia harus dikembalikan kepada kepentingan nasionalnya secara selektif.⁸⁵ Indonesia perlu menetapkan batasan akan sektor-sektor strategis yang tidak dapat dinegosiasikan bagi kedaulatan ekonomi, seperti ketahanan pangan, industri strategis, atau keberlanjutan kebijakan hilirisasi industri tertentu. Hal ini menjadi semakin penting di tengah irisan geopolitik dan ekonomi saat ini yang kian menuntut perubahan diplomatik.

Penutup

Dunia dalam dinamika saat ini telah beralih kepada persoalan ketangkasan merespons restrukturisasi rantai pasok yang kian selektif. Kajian telah menegaskan bahwa Indonesia berada di titik persimpangan yang krusial. Meski perang dagang menciptakan ruang substitusi, arus pengalihan tidak secara otomatis mengalir ke dalam negeri. Literatur dan bukti empiris menunjukkan bagaimana diversifikasi pasokan cenderung menguntungkan negara yang telah memiliki pangsa pasar awal yang signifikan, dengan keterkaitan produksi yang mapan di pasar tujuan. Akibatnya, meski Indonesia memiliki tarif yang lebih kompetitif dibanding Tiongkok, keunggulan tersebut belum berhasil dikonversi menjadi keuntungan ekonomi secara riil. Pada saat yang sama, tulisan ini juga menyadari bahwa isu menjadi semakin kompleks tatkala keterbatasan kapasitas produksi dan absennya Indonesia dalam akses pasar preferensial ke Amerika Serikat membatasi kemampuan Indonesia sebagai pemasok alternatif.

Di sisi lain, penyesuaian yang paling nyata terjadi melalui peningkatan impor bahan baku dan barang antara dari Tiongkok. Meski menjadi salah satu sinyal sementara dari *friendshoring*, terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Pertama, proporsi ekspor Indonesia tidak menunjukkan penguatan daya saing manufaktur yang terjadi secara berkepanjangan. Dominasi ekspor barang antara, yang sejauh ini lebih berbasis komoditas, membuat ekspor nasional sangat rentan terhadap guncangan permintaan global dan tidak memiliki daya tawar yang kuat dalam rantai nilai yang lebih kompleks. Kedua, kenaikan ekspor barang jadi Indonesia tidak bisa dijelaskan secara prematur sebagai keberhasilan industrialisasi, sebab kenaikan itu juga menjelaskan kenaikan dependensi terhadap komponen impor barang antara di beberapa sektor, sebagaimana terlihat dari Tiongkok. Ketergantungan ini membuat Indonesia berada di posisi rentan untuk struktur produksinya yang tentu tidak terlepas dari faktor-faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas internasional maupun nilai tukar. Dengan besarnya komponen nilai tambah asing (*foreign value added*) di dalam struktur ekspor, mengindikasikan bahwa Indonesia masih terjebak sebagai lokasi perakitan dengan keterkaitan ke belakang (*backward participation*) yang relatif lemah terhadap industri hulu domestik. Meski demikian, tulisan ini juga mengakui bahwa kandungan impor yang tinggi di dalam nilai eksportnya menunjukkan bahwa negara tersebut sudah berhasil memanfaatkan GVC dalam produksinya, meskipun integrasi tersebut masih berada di level aktivitas bernilai tambah rendah.

Ketiga, Indonesia belum muncul sebagai basis produksi alternatif. Kinerja ekspor barang jadi dari Indonesia ke Amerika Serikat kepada sektor-sektor yang sensitif terhadap tarif perang dagang seperti tekstil dan perlengkapan elektronik cenderung bertumbuh moderat. Keempat, terdapat risiko perlambatan ekspor Indonesia ke depannya apabila tarif bertahan kuat di level *tit-for-tat* mengingat tarif langsung turut memengaruhi permintaan Tiongkok atas ekspor bahan baku Indonesia sehingga efek rambatan justru bersifat negatif. Kelima, kenaikan

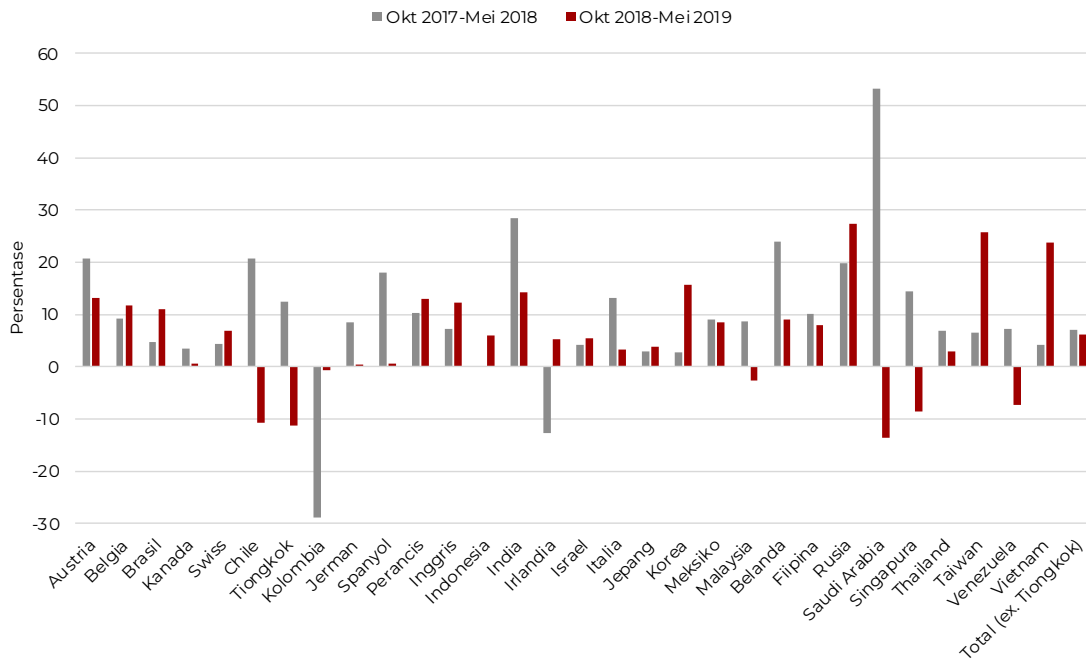
impor Indonesia atas segala barang dari Tiongkok juga mengandung indikasi *transshipment*, meskipun tulisan belum memetakan secara rinci tujuan akhir barang-barang tersebut.

Keseluruhan temuan tersebut membawa implikasi kebijakan yang mendasar bagi orientasi perdagangan internasional Indonesia. Rendahnya tingkat kompleksitas industri serta hambatan struktural dalam keterlibatan GVC menjadi alasan mengapa Indonesia belum mampu mendapat manfaat diversifikasi ekspor secara signifikan. Fenomena ini sejatinya adalah sebuah titik awal krusial untuk mengevaluasi fundamental daya saing ekspor nasional. Implikasi kebijakannya cukup jelas bahwa respons perdagangan yang hanya bersifat reaktif dan jangka pendek tidak lagi memadai. Indonesia membutuhkan transformasi struktural yang menyinergikan penguatan kapasitas produksi domestik dengan reformasi birokrasi kelembagaan yang adaptif dan berstandar global disertai dengan penguatan daya tawar Indonesia sebagai strategi eksternal. Langkah ini menjadi prasyarat agar fase disrupsi saat ini tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga menjadi titik lompatan untuk mempertegas posisi Indonesia di tengah lanskap ekonomi dunia yang sedang dibentuk ulang.

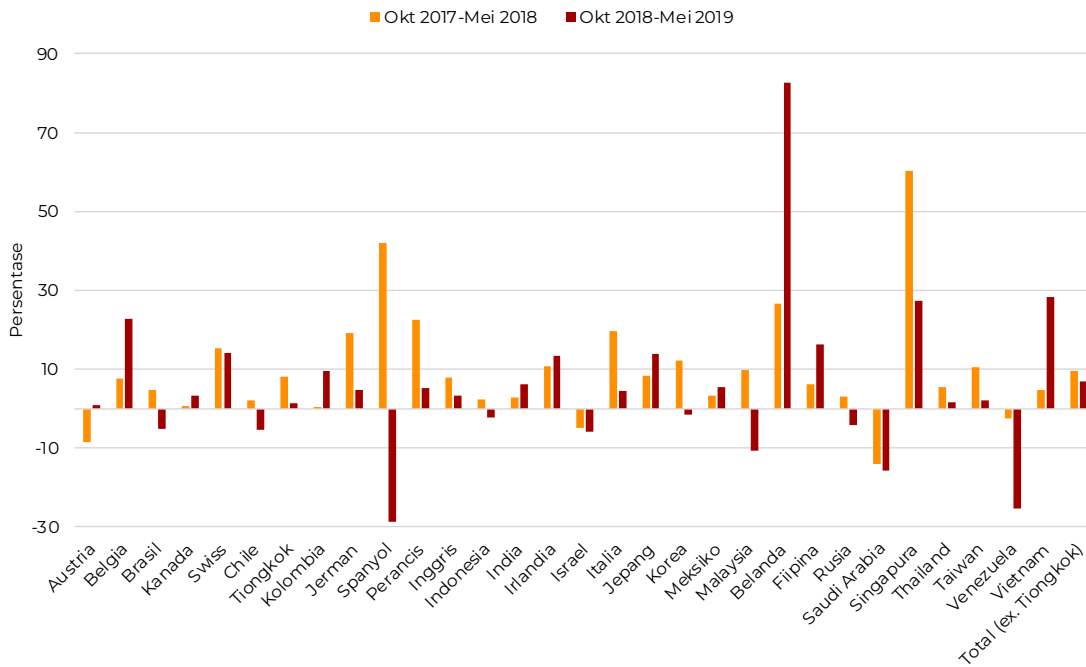
Sebagai akhir, tulisan menyadari bahwa dinamika restrukturisasi GVC dan eskalasi kebijakan tarif tidak dapat sepenuhnya dijelaskan hanya dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik struktural. Cakupan penelitian studi ini tidak termasuk aspek politik yang bersifat kontingen, terutama yang dihasilkan dari kepemimpinan dan preferensi pribadi para pemain utama. Kebijakan tarif dan pendekatan konfrontatif terhadap Tiongkok selama pemerintahan Donald Trump, misalnya, terkait erat dengan perhitungan politik domestik, kepentingan elektoral, dan pengaruh lingkaran elite serta koalisi kepentingan di sekitarnya. Unsur-unsur ini menunjukkan bagaimana kebijakan ekonomi luar negeri dipengaruhi tidak hanya oleh struktur sistem internasional tetapi juga oleh interaksi kepentingan nasional yang tercipta, politik domestik, dan preferensi pribadi para pemimpin. Faktor ini tidak dieksplorasi lebih lanjut dalam karya ini sehingga memberikan ruang bagi penelitian masa depan yang menyelidiki dimensi agensi politik, kepemimpinan, dan dinamika koalisi domestik dalam menentukan arah geoekonomi ke depan.

Lampiran

Lampiran 1. Pertumbuhan Impor AS kepada Negara-Negara untuk Barang Terkena Tarif



Lampiran 2. Pertumbuhan Impor AS kepada Negara-Negara untuk Barang Tidak Terkena Tarif



**Lampiran 3. Nilai Tambah Tiongkok dalam Ekspor Bruto Indonesia
Berdasarkan Indikator *Trade in Value Added* (TiVA), 2022**

Aktivitas	Sektor	Impor Input Tiongkok (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,52
A01	Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian	12,93
A02	Kehutanan dan Penebangan kayu	3,09
A03	Perikanan dan Budidaya Perairan	9,65
B	Pertambangan dan Penggalian	36,33
B05	Pertambangan Batubara dan Lignit	41,52
B05_06	Pertambangan dan Ekstraksi Produk Energi	36,60
B06	Ekstraksi Minyak Bumi dan Gas Alam	22,87
B07	Pertambangan Bijih Logam	35,82
B07_08	Pertambangan dan Penggalian Produk Non-energi	35,55
B08	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	10,27
B09	Aktivitas Layanan Pendukung Pertambangan	4,27
BTE	Industri (Kecuali Konstruksi)	26,62
C	Industri Pengolahan	20,92
C13T15	Industri Tekstil, Pakaian Jadi, Kulit, dan Produk Terkait	6,41
C19	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	15,69
C19T23	Industri Bahan Kimia dan Produk Mineral Non-Logam	18,22
C20	Industri Bahan Kimia dan Produk Kimia	22,93
C20_21	Industri Bahan Kimia dan Farmasi	22,28
C21	Industri Produk Farmasi Dasar dan Persiapan Farmasi	0,00
C22	Industri Barang dari Karet dan Plastik	2,61
C23	Industri Barang Galian Bukan Logam	6,13
C24	Industri Logam Dasar	74,52
C24_25	Industri Logam Dasar dan Barang Logam, kecuali Mesin dan Peralatan	69,50
C25	Industri Barang Logam Fabrikasi, kecuali Mesin dan Peralatan	2,19
C26	Industri Komputer, Barang Elektronik, dan Optik	13,06
C27	Industri Peralatan Listrik	6,85
C28	Industri Mesin dan Perlengkapan	4,27
C29	Industri Alat Angkutan	1,36
C29_30	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer, dan Semi-Trailer dan Alat Angkut Lainnya	0,00

C30	Industri Alat Angkut Lainnya	4,22
C301	Pembangunan Kapal dan Perahu	0,00
C302T309	Industri Perlengkapan Kereta Api, Pesawat Terbang, Kendaraan Tempur, dan Alat Angkut Lainnya	6,14
D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap Panas, dan Udara Dingin	24,06
F	Konstruksi	23,47
FTT	Total Jasa (termasuk Konstruksi)	19,73
GTN	Jasa Ekonomi Bisnis - Bagian G hingga N	19,82
GTT	Layanan (kecuali Organisasi dan Badan Ekstrateritorial)	19,73
H	Transportasi dan Pergudangan	25,82
H49	Angkutan Darat dan Angkutan Rel	32,77
H50	Angkutan Air	27,29
H51	Angkutan Udara	17,69
H52	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan	20,84
H53	Pos dan Kurir	0,00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,63
INFO	Industri Informasi	13,48
J	Informasi dan Komunikasi	14,47
J61	Telekomunikasi	15,85
J62_63	Pemrograman Komputer, Konsultasi, dan Jasa Informasi Terkait	14,40
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,81
L	Real Estat	10,65
M	Jasa Perusahaan	6,64
N	Jasa Administrasi dan Penunjang	21,05
OTQ	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	24,55
P	Jasa Pendidikan	34,73
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,46
R	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	8,26
S	Jasa Lainnya	15,75
_T	Total Seluruh Aktivitas	24,88

Lampiran 4. Penjelasan Metode *Local Projection*

Metode *Local Projection* pertama kali diperkenalkan oleh Òscar Jordà (2005) dalam artikelnya "Estimation and Inference of Impulse Responses by *Local Projections*" (AER). Jordà mengembangkan LP sebagai alternatif dari *Vector*

Autoregressive (VAR) karena banyak peneliti membutuhkan cara sederhana untuk mengestimasi *impulse response* tanpa harus mengasumsikan struktur yang restriktif. Metode ini telah digunakan untuk menganalisis dinamika tarif dan performa ekspor oleh sejumlah penelitian yang dilakukan oleh Alfaro dan Chor (2026),⁸⁶ Furceri et al. (2021),⁸⁷ dan Boer et al. (2024).⁸⁸

Model dibangun dengan membersihkan dataset dari observasi dengan nilai hilang pada variabel utama (ekspor, tarif, dan nilai tukar), kemudian disusun sebagai panel dengan identitas negara dan waktu bulanan. Variabel *outcome* didefinisikan sebagai perubahan log ekspor, disrupsi distorsi kebijakan direpresentasikan oleh perubahan tarif ($\Delta\tau$). Untuk menangkap heterogenitas dampak kepada Indonesia, dibangun interaksi antara $\Delta\tau$ dan *dummy* Indonesia. Spesifikasi untuk setiap horizon $h=0, \dots, 12$ bulan mengestimasi regresi efek tetap negara, dengan *standard error* yang dikelompokkan di level negara, dan memasukkan kontrol makro utama berupa perubahan nilai tukar, indeks harga konsumen eksportir dan importir, serta Baltic Dry Index. Regresi juga menambahkan dua variabel *lag* dari masing-masing variabel kontrol guna mengurangi bias dinamika tersisa, dengan mundur satu hingga dua bulan ke belakang. Dengan menggunakan parametrik dan non-parametrik kontrol variabel ini, peneliti telah berusaha menghilangkan efek *omitted variable* dan bias lainnya sehingga efek yang tertangkap adalah murni dari model tersebut.

Untuk setiap horizon, koefisien dan *standard error* telah diekstraksi dan disusun menjadi matriks *Impulse Response Function* (IRF), yang kemudian dikonversi menjadi variabel untuk membangun interval kepercayaan 95 persen. Hasil akhir kemudian divisualisasikan sebagai lintasan IRF Indonesia dan Tiongkok selama 12 bulan setelah distorsi tarif, lengkap dengan interval kepercayaan, sehingga memungkinkan evaluasi dan trajektori dari dampak kebijakan tarif Amerika Serikat tersebut.

Struktur model ini secara sederhana dapat mengisolasi gejala kebijakan dan sejalan dengan konteks empiris perang dagang. Dalam konteks itu, tarif AS terhadap Tiongkok adalah guncangan eksogen bagi kedua negara sehingga model tidak memerlukan variabel kontrol yang kompleks untuk mengatasi endogenitas kebijakan. Interaksi antara *dummy* Indonesia dan variabel tarif memungkinkan analisis terfokus kepada arah respons Indonesia, misalnya terkait apakah Indonesia menikmati pengalihan perdagangan, mengalami penurunan ekspor melalui mekanisme rantai pasok, atau bahkan tidak mengalami dampak signifikan sama sekali. Karena fokus penelitian adalah dinamika lintas-horizon, bukan hanya efek satu periode, maka *local projection* memberikan fleksibilitas untuk membedakan fase awal guncangan, fase penyesuaian, serta fase pemulihan. Hal ini sangat relevan dalam perang dagang, di mana penyesuaian perdagangan tidak berlangsung secara instan tetapi bergerak secara dinamis melalui mekanisme yang memungkinkan seperti kontrak dan *inventory cycle*, perubahan jalur distribusi, maupun reorganisasi rantai pasok.

Catatan Akhir

- 1 David Ricardo, *On the Principles of Political Economy and Taxation* (Cambridge Library Collection, 1817).
- 2 Eli Heckscher and Bertil Ohlin, *Interregional and International Trade* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1933).
- 3 Paul Krugman, "Scale Economies, Product Differentiation, and the Pattern of Trade," *American Economic Review* 70, no. 5 (1980): 950–59.
- 4 Hui Mao dan Holger Görg, "Friends Like This: The Impact of the US-China Trade War on Global Value Chains," *Kiel Centre for Globalization (KCG) Working Paper*, no. 17 (2019).
- 5 "Globalisation Has Faltered: It Is Now Being Reshaped," *The Economist*, 24 Januari 2019, <https://www.economist.com/briefing/2019/01/24/globalisation-has-faltered>.
- 6 Jahen F. Rezki, "Fragmentasi Geoekonomi," *Kompas*, 19 Oktober 2023, <https://www.kompas.id/artikel/fragmentasi-geoekonomi>.
- 7 Douglas A. Irwin, "Globalization Is in Retreat for the First Time Since the Second World War," Peterson Institute for International Economics, 28 Oktober 2022, <https://www.piie.com/research/piie-charts/2020/globalization-retreat-first-time-second-world-war>.
- 8 "Geographical Distribution: Implementing Jurisdictions," *Global Trade Alert*, 2025, <https://globaltradealert.org/activity-tracker?ip=2021-01-01,2021-12-31&kin=0>.
- 9 Wawancara bersama Kiki Verico (Jessica Arreta et al., Wawancara Langsung, 11 Desember 2025).
- 10 World Trade Organization, *Ministerial Declaration*, WT/MIN(01)/DEC/1, adopted at the Fourth Session of the Ministerial Conference, Doha, Qatar, 14 November 2001.
- 11 Mao dan Görg, "Friends Like This."
- 12 Alessandro Nicita et al., "Trade and Trade Diversion Effects of United States Tariffs on China," *UNCTAD Research Paper*, no. 37 (6 November 2019).
- 13 Douglas A. Irwin, *Clashing over Commerce: A History of US Trade Policy* (Chicago: University of Chicago Press, 2017).
- 14 Ha-Joon Chang, *Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective* (London: Anthem Press, 2002).
- 15 I. M. Destler, *American Trade Politics*, 4th ed. (Washington, DC: Institute for International Economics, 2005).
- 16 Ibrahim Kholilul Rohman, Mohammad Alvin Prabowosunu, dan Kleovan Nathanael Gunawan, "Trump's 'Reciprocal Tariffs': Global Trade Shock and Implications for Indonesia," *Economic Bulletin* (Jakarta: IFG Progress–Financial Research, 14 April 2025): 9.
- 17 "Perang Dagang: AS Terapkan Bea Masuk ke Produk Cina Bernilai Hampir Rp3.000 Triliun," *BBC News Indonesia*, 18 September 2018, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45556484>.
- 18 "Sejarah Perang Dagang Trump, Ternyata Ide Sudah Ada Sejak 1987," *Tempo*, 8 April 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/sejarah-perang-dagang-trump-ternyata-ide>

[sudah-ada-sejak-1987-1228658](#).

- 19 "Trump's Reciprocal Tariffs Reinstated," Statista, 6 Agustus 2025, <https://www.statista.com/chart/34229/additional-reciprocal-tariffs/>.
- 20 "U.S. Goods and Services Trade 2024: \$3,192B Exports, \$4,110B Imports, \$918B Deficit," Voroniapp, 16 Februari 2025, <https://www.voroniapp.com/trade/-US-Goods-and-Services-Trade-2024-3192B-Exports-4110B-Imports-918B-Deficit-4070>.
- 21 Hendrik Mahlkow et al., "Resilient Global Supply Chains in Times of Escalating Trade Costs," *United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) Policy Brief Series*, no. 26 (Oktober 2025).
- 22 U.S. Bureau of Economic Analysis, "New Foreign Direct Investment in the United States, 2024," BEA News Release, 11 Juli 2025, <https://www.bea.gov/data/intl-trade-investment/new-foreign-direct-investment-united-states>.
- 23 U.S. Bureau of Labor Statistics, "Civilian Unemployment Rate," <https://www.bls.gov/charts/employment-situation/civilian-unemployment-rate.htm>.
- 24 Todd N. Tucker, "Trump's Tariff Tantrum: How Sweeping Tariffs Came to Be and Why It Matters," Roosevelt Institute, 3 April 2025, <https://rooseveltinstitute.org/publications/trump-admin-tariffs/>.
- 25 Pandemi Covid-19 membuat arus perdagangan menjadi terhambat karena pembatasan mobilitas. Lebih lanjut, Tiongkok menghadapi masalah kelebihan kapasitas, yang dalam laporan Maurbeni Institute pada 16 Juni 2025 menyebutnya sebagai "ekspor deflasi", yakni menggambarkan bagaimana Tiongkok mengimbangi hilangnya permintaan AS dengan membanjiri pasar lain seiring pelemahan mata uang Renminbi membuat harga barang Tiongkok lebih murah bagi negara dengan mata uang relatif menguat, termasuk Dolar AS.
- 26 International Trade Centre, Trade Map, diakses pada Desember 2025, <https://www.trademap.org/Index.aspx>.
- 27 Chad P. Bown dan Meredith A. Crowley, "Trade Deflection and Trade Depression," *Federal Reserve Bank of Chicago* (2006), 3.
- 28 Fan Zhai, *Macroeconomic Impacts of Trump 2.0 Tariffs on China: A Model-Based Assessment*, Analytical Note, *China Economic Insights* (Singapura: ASEAN+3 Macroeconomic Research Office [AMRO], 19 April 2025).
- 29 Simone Cigna et al., "Trade Fragmentation and the Global Economy, ECB Working Paper, no. 2503 (Frankfurt am Main: European Central Bank, Maret 2021).
- 30 Ana Carla Carvalho, André Azevedo, and Alexandre Massuquetti, "Emerging Countries and the Effects of the Trade War between the US and China," *Economies* 7, no. 2 (2019): 45.
- 31 Alessandro Nicita et al., "Trade and Trade Diversion Effects of United States Tariffs on China."
- 32 Ksenia Koloskova dan Alessandro Nicita, "Import Diversification and Trade Diversion: Insights from United States of America–China Trade Patterns," *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) Working Paper*, no. 3 (Desember 2024).
- 33 Teuku Riefky, Syahda Sabrina, dan Mohamad Dian Revindo, "The Impact of the US–China Tariff War on Trade and Investment in Developing Countries in Disrupted

- Global Value Chains," *Economics and Finance in Indonesia* 71, no. 1 (2025): 21.
- 34 "Thai Exports Jump 19%, Top Estimates Despite Trump Tariffs," *The Business Times*, 27 Oktober 2025, <https://www.businesstimes.com.sg/international/asean/thai-exports-jump-19-top-estimates-despite-trump-tariffs>.
- 35 Kedua negara telah mempersiapkan diri untuk terintegrasi dalam GVC dan menyerap relokasi melalui kebijakan industri yang *forward-looking*, perbaikan infrastruktur, stabilitas politik, serta ketersediaan tenaga kerja dengan upah relatif rendah.
- 36 "Trade Diversion: Blessing or Curse," Rhodium Group, 7 Mei 2025, <https://rhg.com/research/trade-diversion-blessing-or-curse/>.
- 37 Matthew Moshiri, "Political Risk Outlook 2025," *Verisk Maplecroft*, 13 November 2025.
- 38 Matthew Moshiri, "Political Risk Outlook 2025."
- 39 International Trade Centre, Trade Map, diakses pada Desember 2025, <https://www.trademap.org/Index.aspx>.
- 40 "World Container Index," Drewry Supply Chain Advisors, 2025, <https://www.drewry.co.uk/supply-chain-advisors/supply-chain-expertise/world-container-index-assessed-by-drewry>.
- 41 "Ekonomi China Kuartal IV Melambat ke Level Terendah 3 Tahun, Target Tahunan Tercapai," *Kontan*, 19 Januari 2026, <https://internasional.kontan.co.id/news/ekonomi-china-kuartal-iv-melambat-ke-level-terendah-3-tahun-target-tahunan-tercapai>.
- 42 International Trade Centre, Trade Map, diakses pada Desember 2025, <https://www.trademap.org/Index.aspx>.
- 43 International Trade Centre, Trade Map, diakses pada Desember 2025, <https://www.trademap.org/Index.aspx>.
- 44 Teuku Riefky, Syahda Sabrina, dan Mohamad Dian Revindo, "The Impact of the US-China Tariff War on Trade and Investment in Developing Countries in Disrupted Global Value Chains," 14.
- 45 International Trade Centre, Trade Map, diakses pada Desember 2025, <https://www.trademap.org/Index.aspx>.
- 46 "Tariff Simulator U.S. Liberation Day," The Observatory of Economic Complexity, 2025, https://oec.world/en/tariff-simulator-report?compare=liberation_day_2025&scenario=early_2025_new&rules%5B%5D=.
- 47 Ibrahim Kholilul Rohman, Mohammad Alvin Prabowosunu, dan Kleovan Nathanael Gunawan, "Trump's 'Reciprocal Tariffs': Global Trade Shock and Implications for Indonesia," 13.
- 48 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Trade in Value-Added (TiVA) Database 2022, diakses pada Desember 2025, <https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/trade-in-value-added.html>.
- 49 International Trade Centre, Trade Map, diakses pada Desember 2025, <https://www.trademap.org/Index.aspx>.
- 50 World Bank Group, *China Economic Update: Growth Resilience and Reform Momentum* (Washington: World Bank Group, Desember 2017), 2.
- 51 International Trade Centre, Trade Map, diakses pada Desember 2025, <https://www>.

trademap.org/Index.aspx.

- 52 Lorenzo Rotunno dan Michele Ruta, "Trade Partners' Responses to US Tariffs," *IMF Working Paper* (Washington: International Monetary Fund, 18 Juli 2025).
- 53 Justin R. Pierce dan David Yu, "Assessing the Extent of Trade Fragmentation," *FEDS Notes* (Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System, 3 November 2023), <https://doi.org/10.17016/2380-7172.3387>.
- 54 "Ini Alasan Malaysia Mampu Jadi Raksasa Semikonduktor di Asia Tenggara," *CNBC Indonesia*, 12 Mei 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240512135711-128-537387/ini-alasan-malaysia-mampu-jadi-raksasa-semikonduktor-di-asia-tenggara>.
- 55 Òscar Jordà, "Estimation and Inference of Impulse Responses by Local Projection," *American Economic Review* 95, no. 1 (2005): 161-82.
- 56 David Furceri et al., "Macroeconomic Consequences of Tariffs," Working Papers 2019/009 (International Monetary Fund, 2019), <https://www.imf.org/en/publications/wp/issues/2019/01/15/macroeconomic-consequences-of-tariffs-46469>
- 57 Nan Li dan Sergii Meleshchuk, "Bilateral Trade in Services and Exchange Rates: Evidence of Dominant Currency Pricing," *IMF Working Paper* (Washington: International Monetary Fund, November 2024).
- 58 Xingong Ding dan Yong Jae Choi, "Macroeconomic Effects of Maritime Transport Costs Shocks: Evidence from the South Korean Economy," *Mathematics* 11 no. 3668 (2023): 23.
- 59 International Monetary Fund, "Annex 1. Estimation of Impacts Using Local Projections," in *Sovereign Spreads and Fiscal Consolidations, Regional Economic Outlook: Western Hemisphere* (Washington, DC: International Monetary Fund, Oktober 2019).
- 60 Lorenzo Rotunno dan Michele Ruta, "Trade Partners' Responses to US Tariffs."
- 61 Shekhar Aiyar et al., "Goeconomic Fragmentation and the Future of Multilateralism," *IMF Staff Discussion Notes* (Washington: International Monetary Fund, Januari 2023), 4.
- 62 Shekhar Aiyar et al., "Goeconomic Fragmentation and the Future of Multilateralism," 4.
- 63 United Nations Conference on Trade and Development, *Trade and Development Report 2023: Growth, Debt, and Climate: Realigning the Global Financial Architecture* (United Nations, 2024), 40.
- 64 Antoni Estevadeordal et al., Resilience and Reglobalization: Global Value Chain Trends and New Opportunities dalam *Global Value Chain Development Report 2025: Rewiring GVCs in A Changing Global Economy* (World Trade Organization, 2025), 47.
- 65 Binh Thi Thanh Dang et al., "The Impact of the US-China Trade War in Vietnamese Exports to the US: A Quantitative Study using DID Approach," *Journal of Trade Science* 12 no. 4 (2024): 314.
- 66 "Impact of Trade War 2.0 on the Thai Economy," *Krungrsri*, 6 Maret 2025, <https://www.krungrsri.com/en/research/research-intelligence/trade-war-2025>.
- 67 CEIC Data, CEIC Database, diakses pada Desember 2025, <https://www.ceicdata.com/>

- 68 Wawancara bersama I Made Krisna Yudhana Wisnu Gupta (Jessica Arreta et al., Wawancara Melalui Zoom, 9 Desember 2025).
- 69 Indeks Kompleksitas Ekonomi atau Economic Complexity Index dikembangkan oleh Ricardo Hausmann dan Cesar Hidalgo sebagai indikator untuk melihat seberapa besar variasi produk ekspor yang dihasilkan suatu negara (diversity) dan seberapa unik (*ubiquity*). Selain kapasitas produksi, indeks juga mengukur kapasitas intelektual melalui kepemilikan paten teknologi serta kapasitas saintifik melalui pengukuran kedalaman riset.
- 70 "Countries (ECI) Rankings," The Observatory of Economic Complexity, 2023, <https://oec.world/en/rankings/eci/hs4/hs92?tab=ranking>.
- 71 Jay Barney, "Firm Resources and Sustained Competitive Advantage," *Journal of Management* 17 No.1 (1991): 99-120.
- 72 "Usaha Mikro Tetap Merajai UMKM, Berapa Jumlahnya?" Katadata, 13 Oktober 2023, <https://databoks.katadata.co.id/keuangan/statistik/cdcfe12b8f8af2b/usaha-mikro-tetap-merajai-umkm-berapa-jumlahnya>.
- 73 Wawancara bersama I Made Krisna Yudhana Wisnu Gupta (Jessica Arreta et al., Wawancara Melalui Zoom, 9 Desember 2025).
- 74 Baginda Muda Bangsa et al., "Refleksi Delapan Dekade dan Proyeksi Indonesia 2045: Peran Kelas Menengah terhadap Demokrasi." LAB 45 Monograf (Jakarta: Laboratorium Indonesia 2045).
- 75 "Hambatan Investasi di Indonesia: Premanisme, Birokrasi, dan Ketidakpastian Hukum," Kompas, 18 Maret 2025, <https://www.kompas.id/artikel/hambatan-investasi-di-indonesia-premanisme-birokrasi-dan-ketidakpastian-hukum>.
- 76 "GeoTrends: U.S. Tariffs and the Future of China Plus One," The Asia Group, 5 Juni 2025, <https://theasiagroup.com/geotrends-u-s-tariffs-and-the-future-of-china-plus-one/>.
- 77 Tauhid Ahmad, "Indonesia Value Chain Policies: Learning from China's Experience," ECDIC Project Paper 9 (Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2021).
- 78 Wawancara bersama Kiki Verico (Jessica Arreta et al., Wawancara Langsung, 11 Desember 2025).
- 79 Dian Cahyaningrum, "Akselerasi Keanggotaan Penuh Indonesia di OECD," *Isu Sepekan Bidang Ekkuinbang, Komisi VI* (Jakarta: Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, November 2023), 2.
- 80 Wawancara bersama Raden Maisa Yudono (Jessica Arreta et al., Wawancara Melalui Zoom, 10 Desember 2025).
- 81 Wawancara bersama Kiki Verico (Jessica Arreta et al., Wawancara Langsung, 11 Desember 2025).
- 82 Rotunno, Lorenzo, dan Michele Ruta, "Trade Partners' Responses to US Tariffs."
- 83 "ASEAN Needs Synthesised Navigation of The Economics-Security Nexus," East Asia Forum, 23 Mei 2025, <https://eastasiaforum.org/2025/05/23/asean-needs-synthesised-navigation-of-the-economics-security-nexus/>.
- 84 Wawancara bersama Raden Maisa Yudono (Jessica Arreta et al., Wawancara Melalui Zoom, 10 Desember 2025).
- 85 Wawancara bersama Raden Maisa Yudono (Jessica Arreta et al., Wawancara Melalui

Zoom, 10 Desember 2025).

- 86 “An Update on the Great Reallocation in US Supply Chain Trade,” Centre for Economic Policy Research, 22 Januari 2026, <https://cepr.org/voxeu/columns/update-great-reallocation-us-supply-chain-trade>.
- 87 Davide Furceri et al., “The Macroeconomy after Tariffs,” IMF Economic Review (International Monetary Fund, 2021).
- 88 Laurens Boer et al., “The Macroeconomic Consequences of Import Tariffs and Trade Policy Uncertainty,” Working Papers 2024/013 (International Monetary Fund, 2024), <https://www.imf.org/en/publications/wp/issues/2024/01/19/the-macroeconomic-consequences-of-import-tariffs-and-trade-policy-uncertainty-543877>.

Ucapan Terima Kasih

Kami menyampaikan apresiasi mendalam kepada Bapak Kiki Verico selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang memberikan catatan penting terkait ketepatan penggunaan terminologi ekonomi. Beliau meluruskan konsep *trade diversion* yang secara teoretis terjadi akibat penurunan tarif. Hal itu cukup berbeda dengan *trade diversion* yang dalam penelitian ini dimaksudkan karena kenaikan tarif di Amerika Serikat mendorong pengalihan perdagangan ke negara dengan tarif tetap atau tidak diturunkan. Beliau juga menggarisbawahi bahwa metodologi penelitian akan lebih komprehensif jika menggunakan *Systematic Literature Review* (SLR) sehingga mampu menyajikan dialektika atau perdebatan teori yang lebih kaya, dari hal yang meluas menuju pembahasan yang semakin merinci. Selanjutnya, beliau berpandangan bahwa landasan metodologis perlu dipertajam, terutama dalam menjelaskan keterkaitan penggunaan data panel dengan pembacaan dinamika guncangan melalui *Impulse Response Functions* (IRF), serta justifikasi pendekatan *Panel Local Projection* untuk menangkap respons bertahap dalam horizon waktu tertentu. Penjelasan tersebut memastikan bahwa analisis inferensial dalam kajian ini tidak dipahami sebagai prediksi jangka pendek, melainkan sebagai upaya membaca pola penyesuaian ekonomi yang lebih terukur.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Jahen F. Rezki selaku Wakil Kepala Bidang Penelitian LPEM FEB Universitas Indonesia yang menekankan pentingnya memperkuat sudut panjang kajian agar dinamika perang dagang tidak dipahami secara sempit sebagai episode tarif bilateral, melainkan sebagai bagian dari perubahan yang lebih struktural dalam konstelasi geoekonomi global. Beliau memperkaya konteks tulisan ini dengan menyarankan penggunaan data dari Global Trade Alert untuk menunjukkan tren kebijakan perdagangan yang semakin intervensionis. Lebih lanjut, beliau mengingatkan agar tulisan ini tidak menegasikan dampak *scarring effect* pascapandemi yang turut menjelaskan dinamika ketenagakerjaan di AS, tidak hanya semata dipengaruhi oleh penurunan komitmen modal asing langsung (FDI). Selain itu, beliau juga menitikberatkan kepada pentingnya menyisipkan perspektif rantai nilai global (GVC) dan perbandingan lintas negara untuk menguji apakah pengalihan perdagangan benar-benar diikuti oleh pendalaman struktur produksi lokal, sehingga argumen dalam naskah ini memiliki pijakan yang kuat dan mendalam serta tidak berhenti hanya kepada pembacaan tren di permukaan. Terakhir, beliau menyarankan agar bagian akhir tulisan tetap memberi penekanan terhadap kebijakan perdagangan yang mendalam dibandingkan kebijakan industri.

Apresiasi juga kami sampaikan kepada Bapak I Made Krisna Yudhana Wisnu Gupta selaku Dosen Ekonomi Internasional FEB UI, yang telah menyarankan agar landasan logis metode *Local Projection* dijelaskan secara lebih rinci di bagian lampiran. Senada dengan masukan dari mitra bestari sebelumnya, beliau menyarankan agar perbandingan dengan negara lain dapat ditekankan sebagai pembahasan yang tidak kalah pentingnya. Beliau juga memberikan perspektif segar agar analisis geoekonomi dapat dipertajam dengan mengangkat isu

strategis seperti mineral kritis dan industri smelter. Beliau pun menekankan pentingnya keselarasan antara pembahasan dengan rekomendasi kebijakan sehingga solusi yang ditawarkan berangkat dari hambatan mendasar yang telah diidentifikasi dalam pembahasan.

Tim penulis telah berupaya mengintegrasikan masukan para mitra bestari secara maksimal dalam penyempurnaan naskah ini. Namun demikian, kami menyadari bahwa tidak seluruh catatan dapat diakomodasi secara penuh karena keterbatasan ruang lingkup, ketersediaan data, serta pertimbangan fokus analisis. Dalam beberapa bagian, perluasan periode waktu di sejumlah bagan belum dapat dilakukan secara seragam akibat keterbatasan data sekunder yang sebanding di berbagai rentang waktu. Kajian juga belum sepenuhnya merefleksikan secara mendalam kejadian historis yang memicu fluktuasi tarif Amerika Serikat sejak tahun 1980, sehingga komparasi dengan tarif global antar-era masih bersifat terbatas. Di bagian yang memperlihatkan skenario dampak perang dagang berbasis kesiapan industri, kajian belum secara menyeluruh melakukan identifikasi mendetail berdasarkan tingkat kesiapannya, dikarenakan penelaahan tersebut membutuhkan pendalaman yang lebih mendalam dengan penggunaan waktu yang tentunya lebih panjang.

Kajian ini juga belum menyajikan komparasi performa ekspor lintas negara ASEAN secara menyeluruh. Sejauh ini, perbandingan disusun berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu maupun data sekunder, bukan sebagai temuan utama yang dihitung langsung dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan tetap berada dalam fokus utama penelitian dan tidak mengarah kepada analisis empiris yang terlalu meluas.

Dari sisi analisis inferensial, tulisan ini belum memasukkan perhitungan besaran (*magnitude*) IRF maupun estimasi besaran deviasi penurunan ekspor karena pendekatan inferensial dalam kajian ini digunakan terutama untuk membaca trajektori respons dan dinamika penyesuaian, bukan untuk mengukur dampak kausal suatu peristiwa tunggal pada tahun tertentu. Penekanan kepada *magnitude* pada saat bersamaan juga dikhawatirkan dapat menimbulkan salah tafsir atas pola yang sedang dibaca. Meski tulisan ini belum memenuhi seluruh masukan mitra bestari, seluruh catatan tersebut kami anggap sebagai masukan berharga dan akan menjadi rujukan penting bagi pengembangan kajian lanjutan yang lebih kaya ke depannya.